

**PARTISIPASI POLITIK WARGA DISABILITAS
STUDI KASUS ORGANISASI GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA
RUNGU INDONESIA DPD DKI JAKARTA PADA PEMILU 2019**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Disusun Oleh :

Adinda Widya Rini

NIM. 1906016068

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i :

Nama : Adinda Widya Rini

NIM : 1906016068

Jurusan : Ilmu Politik

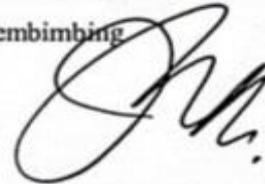
Judul Skripsi : PARTISIPASI POLITIK WARGA DISABILITAS STUDI KASUS
ORGANISASI GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNARUNGU INDONESIA PADA
PEMILU 2019.

Dengan ini saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Semarang, 19 Desember 2022

Pembimbing



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

**PARTISIPASI POLITIK WARGA DISABILITAS STUDI KASUS ORGANISASI GERAKAN
UNTUK KESEJAHTERAAN TUNARUNGU INDONESIA DPD DKI JAKARTA PADA
PEMILU 2019**

Disusun Oleh

Adinda Widya Rini

1906016068

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 19 Desember 2022 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.

.....
NIP.196805051995031002

Sekretaris



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.

.....
NIP.196805051995031002

Penguji I



Dr. Moh. Khasan, M.Ag.

.....
NIP.197412122003121004

Penguji II



Masrohatun, M.Si.

.....
NIP.198806212018012001

Pembimbing



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.

.....
NIP.196805051995031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "*Partisipasi Politik Warga Disabilitas Studi Kasus Organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia DPD DKI Jakarta Pada Pemilu 2019*" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dengan penuh dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang atau di lembaga tinggi lainnya. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbit maupun belum/tidak di terbitkan, sumbernya di cantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 19 Desember 2022

Yang menyatakan,



Adinda Widya Rini

NIM.1906016068

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan-Nya serta limpahan kasih sayang dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan judul sebagai berikut: “ **PARTISIPASI POLITIK WARGA DISABILITAS STUDI KASUS ORGANISASI GERAKAN KESEJAHTERAAN UNTUK TUNARUNGU INDONESIA DPD DKI JAKARTA PADA PEMILU 2019** ”.

Adapun maksud dan tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir Skripsi ini sebagai persyaratan guna memenuhi Ujian Akhir dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari meskipun dalam terlaksananya penyusunan Laporan Tugas Akhir Skripsi ini telah mencurahkan seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki serta dijalankan dalam penelitian lapangan, namun penulis merasa bahwa Laporan Tugas Akhir Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih serta menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis, baik berupa saran, bimbingan, maupun dengan semangat selama terlaksananya penelitian lapangan hingga terwujudnya Laporan Tugas Akhir Skripsi ini, antara lain kepada :

1. Allah SWT, Orang Tua, dan Kakak yang selalu mengiringi doa disetiap langkah arah gerak penulis serta dukungan keluarga, baik dari segi materil maupun non-materil;
2. Almh. Eyang Sri Utami yang selalu mengiringi doa serta dukungan kepada penulis untuk selalu semangat menyelesaikan studi kuliah;
3. Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag selaku Kepala Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu selalu memberikan dukungan dan semangat serta meluangkan pikiran maupun tenaga dalam memberikan pengarahan bimbingan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir Skripsi ini;
4. Bapak Imam Taufiq selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan Ibu Dr.Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
5. Bapak Dr. Moh Khasan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Dosen Penguji I dan Ibu Masrohatun, M.Si selaku Dosen Penguji II Laporan Tugas Akhir Skripsi ini;

6. Seluruh jajaran dosen pengajar Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
7. Badan Pengurus Harian seluruh anggota maupun tenaga ahli Senat Mahasiswa FISIP dan UKM Fisip Sport Club UIN Walisongo Semarang Periode 2022 yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam terwujudnya Laporan Tugas Akhir Skripsi ini;
8. Diva Riesty selaku adik sepupu penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis hingga terwujudnya Laporan Tugas Akhir Skripsi ini;
9. Teman-teman KKN Mandiri Misi Khusus Kelompok 5 KKN Ngabean yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga terwujudnya Laporan Tugas Akhir Skripsi ini;
10. Audrey Clara, Roro Suci, Eva Mulyati, Farishi Adityasandi, Cecep Nugroho, Galih Rahmat, Hanif Dwi Kurniawan, Noviani Nazeria, Faradilla, Jelita Prisly, Auliya Sabiqotul, Shelly Sekar, Aprilia Hasna, Dwi Indah, Ilham Citra, Laila Syaharani, Elsa Putri Lestari, Alya Qorry, Naura Millatina, Adela Vina, Nabila, Belina Patricia, Anisa Triwahyuni, Shella Octaria, Litta Nanda, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis hingga terwujudnya Laporan Tugas Akhir Skripsi ini;
11. Pengurus DPD GERKATIN DKI Jakarta dan humas DPP GERKATIN;

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir Skripsi ini dapat menjadi manfaat berdampak positif bagi penulis, pihak yang bersangkutan, dan pembaca. Penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan dikedepannya. Terimakasih atas pengarahan, bimbingan, dan Do'a yang sangat berarti bagi penulis.

Jakarta, 12 Desember 2022



Adinda Widya Rini.

NIM. 1906016068

PERSEMBAHAN

Bissmillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT

Laporan Tugas Akhir Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua Orang Tua : Bapak Teguh Wiyono dan Ibu Rini Purbani terimakasih untuk seluruh dukungan, doa, dan kasih sayang dalam langkah kehidupan saya serta Fakultas tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

MOTTO HIDUP

*"Hidup adalah anugerah kebahagiaan yang tercipta
Proses dalam kehidupan akan sia-sia tanpa iringan doa
Ilmu akan tidak berarti tanpa usaha
Bahagia tercipta karena doa dan usaha".*

ABSTRAK

Pemilu merupakan proses pemilihan atau kontestasi dinamika politik pesta demokrasi di suatu negara dengan didasarkan tinggi rendahnya tingkat partisipasi serta kesadaran berpolitik sebagai warga negara dalam menyuarkan hak pilihnya dengan bijak. Partisipasi politik warga disabilitas salah satu diantaranya menjadi konteks perhatian eksklusif dalam Pemilu. Hak Pilih bagi penyandang disabilitas dilindungi dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi hak politik dari partisipasi politik bagi pemilih penyandang disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2019 mengalami peningkatan partisipasi penyandang disabilitas berkisar 75 %. Peningkatan partisipasi politik pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2019 dibantu dengan sosialisasi program dan kegiatan pemilu kepada penyandang disabilitas. Salah satu keberhasilan dalam peningkatan partisipasi politik pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 yakni melalui Organisasi penyandang disabilitas Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) sebagai wadah dalam membantu mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih disabilitas, peran politik organisasi melalui pembinaan terhadap penyandang disabilitas Tunarungu. Fenomena ini menarik untuk dikaji melalui pengamatan faktor determinan tingkat partisipasi pemilih disabilitas dan peran politik organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia.

Tujuan penelitian hal ini yaitu untuk mengetahui faktor determinan yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik warga disabilitas DKI Jakarta dalam pemilu 2019 dan peran politik organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia dalam mendampingi warga disabilitas dalam pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data yang disajikan secara deskriptif. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pengumpulan data dan informasi yang disajikan melalui metode wawancara dan dokumentasi pengamatan. Pada narasumber penelitian ini dipilih secara *purposive*. Analisis data berdasarkan fenomena data di lapangan dan dikaitkan dengan teori politik yakni partisipasi politik dan peran politik atau psikologi sosial.

Hasil penelitian ini adalah Faktor determinan sebagai pendorong dari adanya peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas tunarungu dalam Pemilu 2019 sangat mempengaruhi terhadap tingkat partisipasi khususnya dalam faktor karakteristik pribadi dan faktor karakteristik sosial. Faktor karakteristik pribadi atas rasa percaya diri motivasi dan semangat dalam diri dengan keinginan yang besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik pada Pemilu 2019 dan faktor karakteristik sosial didasari dengan adanya pendekatan keterikatan dengan salah satu partai pendukung calon presiden kandidat nomor urut.02 dalam dengan menguatkan jalinan hubungan yang baik dengan organisasi penyandang disabilitas. Sementara halnya, peran politik interaksi sosial yang dibangun guna mengambil peran penting yang dilakukan oleh Gerakan Kesejahteraan Tunarungu untuk Indonesia dalam membina para penyandang disabilitas dan meningkatkan suara pemilih warga disabilitas di DKI Jakarta pada Pemilu 2019.

Kata Kunci : Disabilitas Tuna Rungu, Partisipasi Pemilih, Peran Politik, Pemilihan Umum

ABSTRACT

Elections are the process of selecting or contesting the political dynamics of a democratic party in a country based on the high or low levels of participation and political awareness as citizens in voicing their right to vote wisely. One of the political participations of disabled citizens is the context of their exclusive concern in elections. Voting rights for persons with disabilities are protected in Law Number 7 of 2017 which becomes the political right of political participation for voters with disabilities. The participation of disabled voters in the 2019 election has increased the participation of persons with disabilities around 75%. Increasing the political participation of voters with disabilities in the 2019 election is assisted by socialization of election programs and activities for persons with disabilities. One of the successes in increasing the political participation of disabled voters in the 2019 election, namely through the Movement for Welfare of the Deaf Indonesia Disabled Persons Organization (GERKATIN) as a forum to help influence the level of participation of voters with disabilities, the role of organizational politics through coaching for persons with hearing impairments. This phenomenon is interesting to study through observing the determinants of the level of participation by disabled voters and the political role of the Movement for the Welfare of the Deaf Indonesia organization.

The purpose of this research is to find out the determinant factors that influence the high political participation of citizens with disabilities in DKI Jakarta in the 2019 elections and the political role of the Movement for Welfare of the Deaf Indonesia organization in assisting citizens with disabilities in the 2019 elections. This research uses qualitative research methods with data analysis presented in a graphical way. descriptive. This type of approach in this study is a case study. Collection of data and information presented through interviews and observation documentation. The informants for this research were randomly selected purposive. Data analysis is based on data phenomena in the field and is linked to political theory, namely political participation and the role of politics or social psychology.

The results of this study are that the determinant factor as a driving force for the increased participation of voters with hearing impairments in the 2019 election greatly influences the level of participation, especially in terms of personal characteristics and social characteristics. Personal characteristic factors for self-confidence, motivation and enthusiasm within oneself with a great desire to participate in political activities in the 2019 Election and social characteristic factors are based on an attachment approach with one of the supporting parties for presidential candidate serial number.02 in strengthening relationships. which is good with organizations of persons with disabilities. Meanwhile, the political role of social interaction which was built to take on the important role played by the Deaf Welfare Movement for Indonesia in fostering persons with disabilities and increasing the voters' votes for disabled citizens in DKI Jakarta in the 2019 election.

Keywords: Deaf Disability, Voter Participation, Political Role, General Election

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	15
E. Metode Penelitian	15
BAB II	21
KERANGKA TEORI.....	21
1. Teori Partisipasi Politik.....	21
2. Teori Peran	26
BAB III	29
GAMBARAN UMUM DAN PEMBINAAN GERKATIN TERHADAP DISABILITAS	29
A. Gambaran Umum.....	29
1. Sejarah Singkat	29
2. Visi Misi.....	30
3. Tujuan Organisasi.....	30
4. Landasan Hukum	31
5. Struktur Organisasi	31
B. Pembinaan Gerkatina.....	32
1. Perayaan Hari Bahasa Isyarat Internasional	33
2. Pemberdayaan Perempuan Tuli	33
3. Pelatihan Soft Skill untuk SDM Tuli	34

4. Kesehatan Mental untuk Tuli	34
5. Perlindungan Diri dari Kekerasan Seksual	35
6. Seminar Advokasi	36
7. Kelas Trainer Penyandang Difabel	36
8. Pawai Hak Bahasa Isyarat	37
BAB IV	38
PARTISIPASI POLITIK WARGA DISABILITAS ORGANISASI GERKATIN DPD DKI	
JAKARTA PADA PEMILU 2019	38
A. Faktor Determinan yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Politik Warga Disabilitas DKI Jakarta Dalam Pemilu 2019	38
1. Faktor Karkteristik Pribadi	39
2. Faktor Karakteristik Sosial	42
3. Faktor Perangsang Politik	44
4. Faktor Pendidikan Politik	47
BAB V	50
PERAN POLITIK ORGANISASI GERKATIN DPD DKI JAKART PADA PEMILU 2019.....	
A. Peran Politik Organisasi GerkatIn Dalam Mendampingi Warga Disabilitas DKI Jakarta Pada Pemilu 2019.....	50
1. Hari Bahasa Isyarat Internasional	50
2. Pelatihan bersama Federasi Dunia Tuli dan Seminar Advokasi	52
3. Pelatihan Soft Skill untuk SDM Tuli	53
4. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Tuli	54
5. Webinar Kesehatan Mental	55
6. Volunteer Pendampingan Disabilitas	56
BAB VI	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Kebijakan Terhadap Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2009 dan 2014	3
Table 2 Jumlah Pemilih Disabilitas Tunarungu DPD Gerkatin DKI Jakarta Pada Pemilu 2019	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019	4
Gambar 2. Piramida Partisipasi Politik Milbrath	24
Gambar 3. Logo GERKATIN	29
Gambar 4. Lokasi Sekretariat Gerkatina DPD DKI Jakarta	32
Gambar 5. Hari bahasa isyarat internasional.....	33
Gambar 6. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Tuli/Tunarungu.....	33
Gambar 7. Pelatihan Soft Skill untuk SDM Tuli.....	34
Gambar 8. Webinar Kesehatan Mental untuk Tuli.....	35
Gambar 9. Webinar Perlindungan Diri dari Kekerasan Seksual	35
Gambar 10. Federasi Dunia Tuli dan Seminar Advokasi	36
Gambar 11. Kelas Trainer Penyandang Disabilitas.....	36
Gambar 12. Hari Bahasa Isyarat Internasional 2019	27
Gambar 13. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Isyarat	37
Gambar 14. Dialog Nasional Pemuda	41
Gambar 15. Pidato Capres No.urut 02.....	43
Gambar 16. Grup Whatsapp Gerkatina DPD DKI Jakarta.....	45
Gambar 17. Sosialisasi Pemilu untuk disabilitas.....	48
Gambar 18 Surat Pengantar Penelitian/Wawancara.....	66
Gambar 19. Wawancara bersama Pengurus DPP Gerkatina Bidang Kepemudaan	67
Gambar 20. Wawancara dengan Bapak Fedayen selaku Humas Gerkatina.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan besar dalam perkembangan dan keberhasilan proses pemilihan atau pesta demokrasi di suatu negara didasarkan tinggi rendahnya tingkat partisipasi serta kesadaran berpolitik sebagai warga negara dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan dalam menyuarkan hak pilihnya dengan bijak. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai negara demokratis. Negara demokratis secara rutin dan periodik menyelenggarakan pesta demokrasi. Mekanisme proses pemilihan umum, baik yang berkaitan dengan pemilihan presiden maupun pemilihan umum anggota legislatif, maupun pemilihan umum kepala daerah tercatat dalam runtutan sejarah yang menuai banyaknya hambatan, konflik, hingga kontroversi. Rendahnya kesadaran politik serta kurangnya edukasi politik dapat memicu sebagai faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi politik. Rendahnya tingkat partisipasi politik pada proses pemilihan umum tidak hanya dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman edukasi politik melainkan disebabkan pula oleh rendahnya daya pendukung yang memfasilitasi keberhasilan proses pemilihan umum secara keberlangsungan. Warga disabilitas sebagai indikator penting yang selayaknya diperhatikan dalam hal kesetaraan hak pilihnya sebagai warga negara. Segala keterbatasan tidak sepatasnya menjadi faktor kelemahan dari suatu mekanisme proses pemilihan umum.

Lebih dari 35% penyandang disabilitas tidak memiliki akses atau pemahaman tentang pemilu, menurut The Asia Foundation. Hal tersebut dapat dipahami sebagaimana halnya dalam mencapai sebanyak 35% lebih proses pemilihan umum belum dapat dikatakan berhasil sempurna. Pada realitanya para penyandang disabilitas belum mendapatkan kesetaraan dan keadilan dalam mempergunakan prioritas hak pilihnya. Tingkat angka partisipasi politik warga disabilitas menjadi indikator penentu keberhasilan proses pemilihan umum serta proses berdemokrasinya suatu negara (Merly Mario:2015). Pemilih dalam pemilihan umum langsung menunjukkan keterlibatan politiknya dalam pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya, khususnya (Luthfi Munzir:2018)

Hak Pilih bagi penyandang disabilitas dilindungi dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi hak politik dari partisipasi politik bagi pemilih penyandang disabilitas. Dalam mekanisme pemilihan pun diikuti dengan adanya persiapan pendampingan di TPS serta sosialisasi ke sejumlah panti sosial di DKI Jakarta.

Partisipasi politik warga disabilitas menjadi perhatian eksklusif bagi para alam pandangan islam. Penyandang disabilitas sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang

dimuliakan dan dihormati walaupun ditengah keterbatasan cacat fisik yang dijalaninya. Memperlakukan sesuatu hal yang dimuliakan oleh Allah SWT. dengan sebaik-baiknya sama halnya dengan melakukan perbuatan terpuji seperti yang dianjurkan atas perintah Allah SWT sebagai Sang maha pencipta makhluknya. Berkaitan dengan mensejahterakan penyandang disabilitas Allah SWT berfirman dalam salah satu ayat Al Qur'an yakni surat QS. An-Nahl [16]: 90:

وَالْبُغْيَ الْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِهَا الْقُرْبُ بِذِي إِتْيَانٍ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ أَمْرٌ لِلَّهِ
تَذَكَّرُوا وَعَلَّمَكُمْ عِظَمَكُمْ

Artinya : *Bahkan, Allah memerintahkan Anda untuk melakukan keadilan, melakukan kegiatan yang baik, mendukung keluarga Anda, dan melarang perbuatan buruk, kejahatan, dan permusuhan. Dia menginstruksikan Anda agar Anda mengambil kelas.*

Pada konteks salah satu ayat Al Qur'an QS. An-Nahl [16]: 90 menegaskan bahwa sebaik-baiknya manusia sesama dalam bentuk yang sama sebagai makhluk ciptaan Allah SWT diperintahkan untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Hal tersebut berkaitan erat dengan adanya hak pilih bagi penyandang disabilitas yang dibentuk secara adil untuk bisa dirasakan sebagai suatu bentuk hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara yang berbangsa dan bernegara.

Organisasi sosial sebagai pengembangan sumber daya manusia di bidang pemberdayaan disabilitas Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, atau GERKATIN, memiliki potensi besar untuk membantu penyandang tunarungu di Indonesia mengakui hak mereka untuk mengakses organisasi di semua aspek kehidupan sosial Indonesia. Fakta mendalam menjadi organisasi nasional dengan relasi kerjasama terhadap pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan tercapainya kesejahteraan dan peningkatan kompetensi tunarungu dalam segala aspek penghidupan, kegiatan organisasi GERKATIN di DPD DKI Jakarta tidak hanya mendasari sebatas suatu wadah yang hanya bergerak di satu aspek atau suatu program saja, namun organisasi GERKATIN DPD DKI Jakarta mampu menjadi wadah dalam membantu meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dengan baik dibawah naungan bidang kepemudaan dan advokasi kesetaraan.

Penyandang disabilitas tuna rungu secara garis besar sudah jelas mengalami banyak kendala dalam menerima berbagai informasi terkhusus bentuk komunikasi yang dilakukan dari mulut ke mulut. Namun sesuai dengan segala pengharapan yang ingin diwujudkan untuk mampu mengedepankan kesetaraan dalam mencapai kesejahteraan,

bidang kepemudaan dan advokasi kesetaraan organisasi GERKATIN DPD DKI Jakarta berupaya dalam mengubah cara pandang segala keterbatasan dapat diatasi melalui pendidikan dengan akses visualisasi. Seperti halnya antara lain menggunakan bahasa isyarat, menulis, membaca bibir, dan membaca teks berjalan.

Sejak tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan yang menaungi dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU membuat pedoman atau peraturan mengenai pemilih penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu berdasar atas orientasi kebijakan kepada masalah (*problem-oriented*) dan tindakan (*action-oriented*) dibuat secara terperinci dan jelas untuk diterapkan dalam berbagai problematika pada pemilihan umum.

Tabel.1 Kebijakan Terhadap Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2009 dan 2014

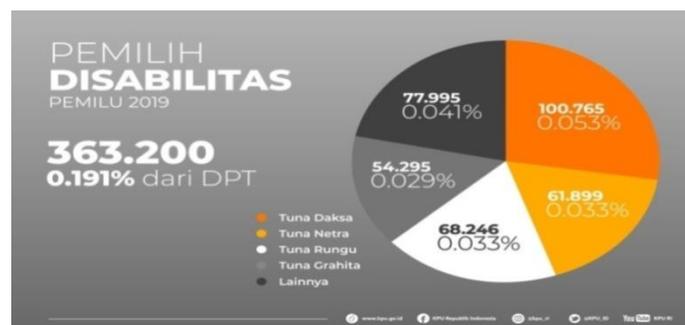
No.	Pemilu Tahun 2009	Pemilu Tahun 2014
1.	KPU tidak memasukkan informasi apapun dalam Juknis PPK/PPS terkait pentingnya pemilu aksesibel bagi penyandang disabilitas.	Buku Panduan KPPS telah memuat secara lebih terperinci mengenai pemilu akses bagi penyandang disabilitas, mulai dari pemberitahuan Bagi pemilih tunanetra, tersedia template braille, dan formulir C3 dapat diisi oleh pendamping.
2.	KPU tidak melibatkan organisasi/para penyandang disabilitas dalam mendesain dan merancang alat bantu bagi pemilih penyandang disabilitas.	Organisasi penyandang disabilitas, seperti PPUA Penca, masuk dalam kebijakan KPU. KPU bahkan meminta pemilih difabel untuk mengunjungi pabrik pembuat template surat suara braille guna mengukur ketebalan template surat suara braille.
3.	Penyandang tunanetra dapat diakomodasi dengan menggunakan tanda centang karena dapat diartikan dengan berbagai cara.	Orang dengan gangguan penglihatan dikatakan lebih mudah menggunakan tanda pukulan karena mereka dapat menyelesaikan tugas tanpa bantuan pendamping.

Fakta kondisi lapangan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas pada pemilu 2014 di DKI Jakarta yakni diantaranya : (1) Informasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pemilu 2014 salah tempat dan tidak muncul di DP4 atau KPU, menurut

Kementerian Dalam Negeri. Di DKI saja, terdapat 500–1.000 penyandang disabilitas yang sebagian besar tetap tinggal di panti asuhan dan berhak memilih. Potensi populasi saat ini mencapai 3,6 juta jiwa, belum termasuk mereka yang menganggap dirinya cacat, namun hingga saat ini belum ada pendataan yang dilakukan (Zak: 2013). (2) Fasilitas TPS yang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Salah satu lokasi studi kasus adalah TPS 026 Kampung Bali, Rt 05/ Rw 10 Kelurahan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Daerahnya relatif berbukit, dan ruang antar bilik sangat padat karena penyandang disabilitas diperbolehkan masuk ke bilik suara. Persoalan yang sama juga terjadi di TPS 045, Desa Sukabumi Selatan, Kec. Kebun Jeruk Jakarta. TPS terletak di tempat yang sulit dijangkau karena menggunakan halaman rumah warga, tempat pemungutan suara berdekatan, serta pintu masuk dan keluar searah. (3) Kelompok Panitia Pemungutan Suara KPPS masih kurang memahami secara komprehensif pedoman yang ditetapkan KPU bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, dia tidak siap untuk itu. Kedua, TPS tidak sesuai untuk masalah dari posisi di mana ia berada karena ada kurva yang menyelesaikan masalah tersebut. (ES, 2014, April 09) (4) Penyandang disabilitas yang tidak menyadari nilai aksesibilitas dalam memberikan kesempatan untuk memilih pada pemilu 2014.

Berdasarkan dataset KPU Data Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019 (KPU,2019) terdapat 363.200 penyandang disabilitas terdaftar sebagai daftar pemilih tetap pada Pemilu 2019 yang tersebar di seluruh Provinsi Indonesia. Tuna Daksa (100.765 orang), Tuna Netra (61.899 orang), Tuna Rungu (68.246 orang), Tuna Grahita (54.295 orang).

Data pemilih khusus bagi penyandang disabilitas terdapat 9.430 data pemilih disabilitas dalam Pemilu Tahun 2019 di DKI Jakarta. Menurut Ketua KPU DKI Jakarta rincian Di DKI Jakarta, terdapat 3.510 orang dengan keterbelakangan mental, 2.177 orang dengan disabilitas lainnya, 1.717 orang dengan disabilitas fisik (difabel motorik), 906 orang dengan gangguan penglihatan (tunarungu), 1.060 orang dengan gangguan pendengaran (tuli), dan 1.060 orang. orang dengan gangguan pendengaran. Berdasarkan kesimpulan rapat pleno daftar pemilih tetap hasil revisi tahap 3, angka data pemilih adalah seperti yang tertera. (Betty Epsilon Idros: 2019)



Gambar.1.1 Data Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019

Sumber : KPU, 2019

Dalam pemilu 2019, keterlibatan pemilih dalam politik akan menjadi tantangan. mengalami peningkatan dibandingkan pada Pilkada tahun 2018. Pada Pilkada tahun 2018, pemilih disabilitas tercatat 36.908 pemilih. Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2019 mengalami peningkatan partisipasi penyandang disabilitas berkisar 75 %. Peningkatan partisipasi politik pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2019 dibantu dengan sosialisasi program dan kegiatan pemilu kepada penyandang disabilitas. Sosialisasi kepada penyandang disabilitas dilakukan dengan mengunjungi panti-panti, organisasi, dan tempat tinggal Hal ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah bagi penyandang disabilitas.(Wage Wardana: 2019).

Peningkatan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2019 didasarkan pada pandangan terminologi sosiologi politik pada teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo , dengan lebih banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam suatu proses politik maka pendidikan politik masyarakat dapat dikatakan berhasil.Pendekatan *psikologi* mendasarkan kepada faktor psikologi atau sikap yaitu yang mempengaruhi perilaku memilih seseorang. Pendidikan politik kepada masyarakat melalui sosialisasi program dan kegiatan pemilu kepada penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan relawan demokrasi penyandang disabilitas sebagai dasar yang melatarbelakangi keberhasilan peningkatan partisipasi politik pemilih disabilitas pada Pemilu tahun 2019 berkaitan dengan konkret pandangan terminologi sosiologi politik dan pendekatan *psikologi* pada teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo.

Pemenuhan hak kesetaraan penyandang disabilitas melalui peraturan kebijakan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh KPU maupun penguatan peran organisasi pemberdayaan kesejahteraan disabilitas DPD GERKATIN DKI Jakarta merupakan langkah yang tepat dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi penyandang disabilitas pada Pemilu dan menjadi tantangan besar dalam mencapai suatu kesejahteraan dan keadilan yang sesuai tanpa adanya suatu bentuk diskriminasi, pengecualian, dan rendahnya pandangan masyarakat secara umum terhadap penyandang disabilitas. Fungsi normatif pada teori peran yang dikemukakan oleh Sarlito Wirawan Sarwono berkaitan dengan penguatan peran politik organisasi pemberdayaan kesejahteraan disabilitas DPD GERKATIN DKI Jakarta) sebagaimana halnya suatu Organisasi memiliki kontrol yang cukup atas individu bagi mereka untuk menegakkan norma-norma tersebut.

Kebijakan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pemerintah memiliki dedikasi yang cukup kuat atas individu mengatasi segala problematika seperti halnya rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu atau Pilkada periode sebelumnya dari pedoman atau peraturan mengenai pemilih penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu berdasar atas orientasi kebijakan kepada masalah (*problem-oriented*) dan tindakan (*action-oriented*). Peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas sebagai wujud nyata dalam suatu pencapaian keberhasilan demokrasi politik suatu negara. Keadilan substantif sebagai tujuan dalam menghilangkan segala bentuk ketidakadilan dalam minoritas dengan mempertimbangkan prinsip secara konkret.

Pemaparan pada uraian tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengambil suatu judul Laporan Tugas Akhir Skripsi adalah : **“PARTISIPASI POLITIK WARGA DISABILITAS STUDI KASUS ORGANISASI GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA RUNGU INDONESIA DPD DKI JAKARTA PADA PEMILU 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diutarakan dalam identifikasi penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor determinan yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik warga disabilitas DKI Jakarta dalam pemilu 2019;
2. Bagaimana peran politik organisasi Gerkatin dalam mendampingi warga disabilitas dalam pemilu 2019;

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat disimpulkan dari penjelasan sebelumnya untuk deskripsi bagaimana faktor determinan yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik warga disabilitas DKI Jakarta dalam pemilu 2019 serta peran politik yang dibangun oleh organisasi Gerkatin DKI Jakarta dalam meningkatkan hak pilih dengan mendampingi penyandang disabilitas dalam pemilu 2019 di DKI Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari identifikasi pemaparan uraian yang ada, maka secara garis besar manfaat penelitian penulis adalah :

1. Manfaat Praktis

Segi Secara praktis, penelitian ini diantisipasi untuk memberikan sebagai manfaat bagi organisasi Gerkatin maupun warga penyandang disabilitas di DKI Jakarta

yang ingin mengetahui tentang partisipasi politik warga disabilitas pada pemilu tahun 2019 ataupun ingin memotivasi masyarakat lain untuk memperjuangkan keadilan dalam suatu kebijakan dengan tetap melindungi hak politik bagi penyandang disabilitas melalui organisasi Gerkatina maupun dengan membentuk lembaga lainnya yang menaungi hak hak bagi penyandang disabilitas.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang ditulis ini diharapkan dapat memberikan peningkatan spekulasi bagi perguruan tinggi dan memperdalam analisis baik dalam bidang sosial serta politik yang saling bersinggungan dengan penegakkan partisipasi politik warga disabilitas dalam mensejahterakan hak politiknya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan literatur tentang keterlibatan politik penyandang disabilitas akan memeriksa karya-karya sebelumnya yang terkait dengan tema tesis.

1. Kajian tentang partisipasi politik penyandang disabilitas

Kajian tentang partisipasi politik penyandang disabilitas telah dianalisis oleh banyak peneliti, diantaranya Aji Pangestu dkk (2020), Dwi Astuti dkk (2021), Agus Dedi dkk (2020), Asrorul Mais dkk (2019), Andre M Fikri (2019), Triaditya Rahman Hamid (2022), Fangky Febriantanto (2019) menjelaskan mengenai kajian partisipasi politik penyandang disabilitas.

Kajian Aji Pangestu dkk (2020) “ Fungsi PPUA Penyandang Disabilitas dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2019 ” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *document studies* atau studi dokumen yakni sumber data primer melalui literature dokumen resmi. Desain dari jenis penelitian ini menggunakan desain studi pustaka yakni menggunakan arsip-arsip dan catatan-catatan dari PPUA sebagai organisasi Pusat Pemilihan Umum Aksesibel. Penelitian ini memfokuskan pada peran PPUA sebagai organisasi Pusat Pemilihan Umum Aksesibel dalam menambah eminensi partisipasi politik dari suatu himpunan pengidap penyakit disabilitas guna menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah PPUA sebagai organisasi Pusat Pemilihan Umum Aksesibel guna memperjuangkan hak-hak politik yang dimiliki oleh para pengidap penyakit disabilitas menjalankan tanggung jawab dan perannya sebagai motivator maupun komunikator dengan baik sebagai mana mestinya. Bentuk advokasi sebagai suatu peran yang dijalankan yakni pertemuan dengan DPR RI guna

mengupayakan hak politik penyandang disabilitas dan pertemuan dengan badan yang menaungi pemilihan umum yakni KPU RI dan BAWASLU RI.

Pertemuan dengan KPU RI mengulas perihal peraturan sebagai acuan TPS secara aksesibel dan pertemuan dengan BAWASLU RI mengulas terkait surat yang digunakan sebagai penguat dalam pengawasan pemilu untuk pemilih penyandang disabilitas. Disertai dengan faktor determinan dari peran yang dijalankan oleh organisasi PPUA dalam konteks sebagai perangsang melalui media massa disertai dengan pendidikan politik dalam ranah asifikasi strategi aksesibilitas penyandang disabilitas. Dalam hasil penelitian ini ditemukan pula tidak difasilitasinya calon anggota legislatif yang berasal dari penyandang disabilitas dalam konteks kampanye oleh partai politik. Dengan hal tersebut mengungkapkan tidak didukungnya oleh partai politik akan berdampak pada sedikitnya kursi yang akan diperoleh oleh penyandang disabilitas dalam mencalonkan dirinya sebagai calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2019.

Kajian Dwi Astuti dkk (2021) “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Selama Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan gaya penelitian deskriptif kualitatif berdasar atas bukti nyata yang terjadi di lapangan. Desain dari jenis penelitian ini menggunakan desain *case studies* atau studi kasus yakni menggunakan sumber data primer disertai wawancara dengan badan atau lembaga yang mengurus perihal pemilihan umum serta organisasi CIQAL dan SIGAB. Penelitian ini memfokuskan pada aksesibilitas atau perwujudan dari fasilitas yang disediakan untuk kesejahteraan serta kemudahan bagi ketika Pemilu 2019 benar-benar digelar, penyandang disabilitas Kabupaten Sleman. Hasil dari penelitian ini adalah aksesibilitas belum terealisasi dengan baik berdasarkan fakta lapangan adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sebagaimana mestinya menjadi suatu fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan terselenggaranya pemilihan umum dengan baik, namun salah satu akses fasilitas ini belum memudahkan terkhususnya bagi penyandang disabilitas dibuktikan dengan adanya tangga yang menyulitkan bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengakses Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut.

Akomodasi serta akseptibilitas ditinjau secara keseluruhan belum terealisasi dengan baik bagi penyandang disabilitas. Petugas lapangan yang tidak ramah dan belum adanya sudut pandang secara terbuka dalam memandang penyandang disabilitas. Secara konsep ketersediaan, material, machine, dan method belum optimal atau tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) pembatasan kapasitas

dan ketanggapan polisi terhadap penyandang disabilitas belum maksimal dalam Pemilihan Umum.

Kajian Agus Dedi dkk (2020) “ Partisipasi pemilih difabel dalam politik pada Pilkada serentak 2019 di Kabupaten Ciamis. Desain penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini yakni dalam penelitian ini berdasar atas fakta fenomena lapangan yang terjadi. Metodologi penelitian jenis ini memanfaatkan desain *case studies* atau studi kasus yakni menggunakan sumber data primer disertai wawancara. Sampel yang diambil dalam wawancara sebagai penguat sumber data primer yakni penyandang disabilitas yang terverifikasi sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Ciamis Tahun 2019 yang Kepala biro data dan sejumlah pejabat KPUD Kabupaten Ciamis lainnya tersebar di 27 kecamatan. Sumber data tambahan yang digunakan seperti halnya dokumen pendukung secara tertulis baik dari informan, media massa, media sosial, maupun media elektronik. Teknik pendukung dalam kajian penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yakni mengaitkan data serta informasi antara satu dengan lainnya guna diinterpretasikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan.

Penelitian ini memfokuskan pada sejauh mana pemilih difabel berpartisipasi dalam politik dan penyebab rendahnya tingkat partisipasi kecacauan pemilu di Kabupaten Ciamis selama pemilihan umum serentak 2019. Pemilihan Umum di Kabupaten Ciamis tahun 2019 dikategorikan sangat rendah. Ditinjau berdasarkan data fakta lapangan, presentase penyandang disabilitas yang terlampir hanya mencapai 36,08% dari jumlahnya secara keseluruhan 4.213 orang. Aspek psikologis seperti halnya rendahnya rasa percaya diri akan keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah salah satu alasan mengapa penyandang disabilitas sangat sedikit berpartisipasi dalam politik. Pendidikan politik terhadap pentingnya pemilihan umum yang dipahami oleh penyandang disabilitas cukup terbilang rendah. Sarana prasarana serta petugas belum optimal dalam membantu penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum di Kabupaten Ciamis tahun 2019. Faktor internal maupun faktor eksternal pada kedua faktor tersebut menjadi pemicu penghambat dalam derajat keterlibatan politik pemilih difabel pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Ciamis.

Kajian Asrorul Mais dkk (2019) “ Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Isu Disabilitas di Kabupaten Jember. Desain penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian ini bersifat faktual dan akurat berdasarkan dengan fakta –fakta maupun fenomena lapangan yang terjadi. Metodologi penelitian jenis ini memanfaatkan desain *case studies* atau studi kasus yakni menggunakan

sumber data primer disertai wawancara dan data sekunder disertai data pendukung berupa dokumen tertulis. Sampel yang diambil dalam *deep interview* atau wawancara sebagai penguat sumber data primer yakni diantaranya SDM Parmas KPU Prov.jatim, SDM Parmas KPUD Jember, Ketua Perpenca Jember, Ketua Relawan Demokrasi Segmen Disabilitas Kab.Jember, Ketua Gerkatim Jember, Ketua Dewan Penasihat Pertuni Jember, dan mantan caleg disabilitas daksa. Kajian penelitian tersebut berdasarkan observasi tidak langsung dan tidak terstruktur. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dikuatkan dengan adanya data dokumen dari lembaga yang bersangkutan beserta data tertulis informan. Teknik pendukung dalam kajian penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yakni mengaitkan data serta informasi antara satu dengan lainnya guna diinterpretasikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan.

Penelitian ini memfokuskan pada regulasi atau peraturan yang mengatur pada mengatur dan melaksanakan pemilihan bagi penyandang disabilitas, tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dan peran partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Jember. Hasil dari penelitian ini adalah adanya regulasi atau peraturan dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dalam turut serta pada konteks partisipasi politik pada Pemilihan Umum tercantum baik UU Nomor 7 Tahun 2017 (Tentang Pemilihan Umum) maupun UU Nomor 8 Tahun 2016 (Tentang Penyandang Disabilitas). Kendala struktural dan kultural menjadi salah satu faktor pemicu penghambat dalam mewujudkan pemilihan umum yang akses dan partisipasi bagi penyandang disabilitas. Solusi alternatif atas kendala yang timbul baik kendala secara struktural maupun kendala kultural melalui komunikasi yang dibentuk oleh organisasi disabilitas disertai dengan berpartisipasi aktif dalam konteks diskursus dan pengembangan saran baik kepada pemerintah maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kajian “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Payakumbuh (PILKADA) Tahun 2017,” oleh Andre M. Fikri, terbitan tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu aktual berdasarkan fakta fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan. Desain dari jenis penelitian ini menggunakan desain *case studies* atau studi kasus yakni menggunakan sumber data primer disertai wawancara dan data sekunder disertai data pendukung berupa dokumen tertulis dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel atau pemilihan informan dalam menguatkan sumber data baik sumber data primer maupun sekunder, beserta *Purposive Sampling* yakni teknik pengambilan sampel data informan disertai dengan pertimbangan melalui kriteria khusus dalam sampel data

guna memperoleh hasil yang representatif dari pemecahan permasalahan penelitian tersebut. Teknik dalam penelitian tersebut didukung dengan teknik triangulasi.

Penelitian ini memfokuskan pada penyebab atau faktor yang melatarbelakangi rendahnya Keterlibatan politik terkait disabilitas di Pilkada Kota Payakumbuh 2017. Hasil dari penelitian ini adalah Komisi Pemilih Umum Daerah (KPUD) sebagai salah satu badan atau lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Payakumbuh tahun 2017 belum optimal dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Payakumbuh. Sudut pandang dalam konteks pendidikan politik maupun edukasi demokrasi bagi penyandang disabilitas sangat minim atau rendah dan sosialisasi belum bekerja secara tepat baik sosialisasi yang dilakukan oleh suatu organisasi penyandang disabilitas PDDI, lembaga KPUD maupun Dinas Sosial. Kondisi tersebut menjadi faktor internal dan faktor eksternal sebagai pemicu dalam menghambat pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Payakumbuh tahun 2017. Regulasi atau peraturan sesuai UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum melekat dalam pelaksanaan demokrasi pada pemilihan umum di kota Payakumbuh tahun 2017 sehingga hak-hak bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan demokrasi pada pemilihan umum di kota Payakumbuh tahun 2017 belum terpenuhi secara maksimal.

Kajian Triaditya Rahman Hamid (2022) “ Upaya Penyamaan Hak Pilih pada Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2020: Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas ” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian ini berdasarkan bukti kenyataan yang terjadi di lapangan. Studi kasus penelitian yang menggunakan desain penelitian fenomenologis ini adalah pemilihan Bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tahun 2020. Sumber data primer digunakan dalam sumber data untuk mendukung data penelitian, diantaranya wawancara baik secara lisan maupun tertulis dengan informan. Informan sampel data dalam sumber data primer penelitian ini adalah pegawai di lingkup sekretariat KPU di Kabupaten Pandeglang dan disertai informan pendukung yaitu masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Pandeglang dan data sekunder disertai data pendukung berupa dokumen tertulis Studi kasus penelitian yang menggunakan desain penelitian fenomenologis ini adalah pemilihan Bupati Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten tahun 2020. Sumber data primer digunakan dalam sumber data untuk mendukung data penelitian, diantaranya

Penelitian ini memfokuskan pada partisipasi dan besar pengaruh Pada tahun 2020, pemilih difabel akan berpartisipasi dalam politik pada pemilihan bupati di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. persentase pemilih difabel yang mengikuti pemilihan bupati tahun 2020 di kabupaten Pandeglang provinsi Banten digolongkan dengan tingkat yang minim atau rendah. Minimnya kesadaran pemenuhan hak politik dalam menyuarakan suara pemilihan bupati dengan tidak menghadiri dan tidak memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta minimnya sosialisasi informasi perihal mekanisme pelaksanaan pemilu Penyebab kurangnya kepekaan terhadap penyandang disabilitas pada pemilihan bupati tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten adalah karena masalah ini.

Kajian Fangky Analisis Faktor-Faktor yang Meningkatkan Inklusi Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 oleh Febriantanto (2019). Penelitian deskriptif kualitatif, khususnyaberdasarkan dengan fakta data yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus, yangPilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Sumber data penelitian ini diperkuat berdasarkan dengan bukti Hasil Pelatihan dan Pengembangan 2017 untuk Kelompok Pilkada di Yogyakarta. Data penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara lisan dan tertulis dengan informan. berasal dari dokumen pendukung penguat data penelitian dari KPU Kota Yogyakarta dan komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun jurnal,skripsi terdahulu yang bersangkutan dengan konteks permasalahan di sini, dalam penelitian. Warga Yogyakarta yang difabel dijadikan sebagai informan penelitian.

Penelitian ini memfokuskan pada faktor pendukung atau determinan dalam peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah Faktor perangsang politik dalam pelibatan di setiap tahapan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 terkhusus dalam daftar pemilih dan faktor pendidikan politik dalam konteks sosialisasi dan edukasi atau pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga yang menaungi penyelenggaraan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 menjadi faktor pendukung atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilih difabel pada Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Motivasi yang tinggi dan bergerak aktif dengan disertai mengikuti kegiatan diskusi politik maupun motivasi tokoh penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik pesta demokrasi dan meningkatkan edukasi atau pendidikan politik dengan memperdalam pemahaman kebebasan sipil yang dinikmati oleh setiap individu dalam demokrasiguna mempersiapkan Pilkada

Kota Yogyakarta tahun 2017 dengan baik tanpa adanya segala bentuk tindakan atau kegiatan diskriminasi.

2. Kajian tentang partisipasi politik dan hak politik Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN)

Kajian tentang partisipasi politik dan hak politik Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) telah dianalisis oleh banyak peneliti, diantaranya Retno Herningrum Pratiwi dkk (2020), Ananda Vita Parameswara (2019), Beny Dwi Lukitoajidkk (2020) menjelaskan mengenai kajian partisipasi politik dan hak politik Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN).

Kajian Partisipasi politik penyandang disabilitas pendatang baru di Pilgub DKI Jakarta 2017, oleh Retno Herningrum Pratiwi dkk (2020). metode kualitatif digunakan dalam penyelidikan ini yakni penelitian ini berdasarkan dengan data deskriptif baik secara tertulis maupun lisan dari informan. Desain dari penelitian ini adalah studi kasus yakni Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Ada dua jenis informasi yang digunakan dalam penelitian: data primer dan data sekunder.dengan tahapan wawancara atau *deep interview* dengan sampel data informan yakni Anggota DPC Gerkatin Jakarta Selatan dan sumber data sekunder sebagai penguat data informan berupa dokumen tertulis dan dokumentasi sebagai penguat data penelitian.

Penelitian ini memfokuskan paada bentuk partisipasi penyandang disabilitas anggota DPC Gerkatin sebagai pemilih pemula dalam Pilkada Gubernur di DKI Jakarta tahun 2017 dan faktor penghambat yang dihadapi anggota DPC Gerkatin sebagai pemilih pemula dalam Pilkada Gubernur di DKI Jakarta tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah rendahnya intensitas dalam tim sukses calon Gubernur DKI Jakarta dan rendahnya tingkat partisipasi politik pada kampanye menjadi faktor yang melatarbelakangi anggota DPC Gerkatin sebagai pemilih pemula dalam Pilkada Gubernur di DKI Jakarta tahun 2017 tergolong kedalam kelompok pengamat. Kurangnya sosialisasi baik dari lembaga atau badan yang menaungi keberlangsungan pelaksanaan Pemilu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yakni Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta dan minimnya kesadaran maupun tanggung jawab petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam berkewajiban penuh membantu atau mendampingi pemilih pemula penyandang disabilitas dalam memberikan hak suara pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 menjadi bukti faktual sebagai faktor penghambat dalam keberlangsungan Pilkada Gubernur di DKI Jakarta tahun 2017.

Kajian Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Kesejahteraan Tunarungu Indonesia di Kota Palembang)," oleh Ananda Vita Parameswara (2019). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif memaparkan data informasi secara akurat dan fakta yang terjadi di lapangan. Desain pendekatan penelitian ini secara fenomenologi yakni berdasarkan interpretasi dari pengalaman tokoh atau pelaku dalam konteks studi kasus di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini dikuatkan dengan proses wawancara terhadap informan. Informan yang digunakan sebagai sampel data penguat Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Kota Palembang adalah pusat informasi utama studi ini. Sumber data sekunder penelitian ini dikuatkan dengan data dokumen, buku, skripsi maupun jurnal terdahulu yang bersangkutan dengan konteks permasalahan pada penelitian tersebut. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni menggunakan model Miles dan Huberman secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sesuai dengan tahapannya.

Penelitian ini memfokuskan pada kendala dan upaya Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) di Kota Palembang dalam memperoleh hak politiknya. Hasil dari penelitian ini adalah keterbatasan fisik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan minimnya pemahaman informasi dalam konteks pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas menjadi faktor internal yang melatarbelakangi sebagai pemicu penghambat dalam memperoleh hak politiknya. Rendahnya sudut pandang masyarakat secara umum terhadap penyandang disabilitas memicu tertutupnya ruang untuk bersosialisasi dan berinteraksi bagi penyandang disabilitas menjadi faktor eksternal menghambat dalam memperoleh pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) sebagai suatu organisasi menjadi wadah bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan upaya pemenuhan hak-hak politiknya dengan melalui konteks sosialisasi informasi, dan musyawarah dengan pejabat daerah setempat.

Kajian Beny Dwi Lukitoaji dkk (2020) Dampak politik pengguna Yogyakarta terhadap keterlibatan politik orang tuli atau tuli di daerah istimewa provinsi. Dalam penelitian ini kami mempekerjakan jenis penelitian kuantitatif yakni penelitian ini berdasarkan penyajian datanya berupa angka. Desain penelitian ini menggunakan desain survey. Populasi yang digunakan dalam survey sumber data Peneliti yang terlibat dalam penelitian ini merupakan peserta aktif GERKATIN (Gerakan Indonesia untuk Kesejahteraan Tuna Rungu) Yogyakarta. Cluster sampling digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini yakni dengan mengklasifikasi atau mengelompokkan populasi sampel data informan. Pengelompokkan populasi sampel data informan seperti

DPC Gerkatina Bantul, DPC Gerkatina Sleman, DPC Gerkatina Kulon Progo. Teknik pengumpulan data survey penelitian dengan angket atau kuesioner dengan teknik analisis data sesuai dengan tahapan scoring tabulasi data, uji normalitas data, uji hipotesis, dan hasil penelitian lainnya

Pengguna politik yang memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi penduduk provinsi terhadap isu politik menjadi subjek utama penelitian ini Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah presentase *political user* tergolong mencapai tingkat tinggi dengan besar presentase secara keseluruhan 81% sebanyak 50 sampel data dan besar presentase partisipasi politik secara keseluruhan sebesar 96,9 % sebanyak 59 sampel data. Bentuk partisipasi politik penyandang disabilitas tuna rungu sangat didukung oleh pemerintah bagi disabilitas dalam menyuarkan hak pilihnya. Apresiasi dan sudut pandang petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) bekerja secara optimal dan maksimal dalam melayani dan membantu bagi penyandang disabilitas. Tingkat kategori yang terbilang tinggi dalam peran penggunaan internet sebagai media atau wadah dalam kegiatan politik seperti halnya kampanye yang dijalankan oleh berbagai elite politik. Tingginya tingkat *political user* dalam kegiatan politik tersebut menunjang kemajuan tingkat partisipasi politik bagi penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Peneliti menetapkan Para peneliti di balik penelitian ini secara khusus memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif, prosedur pengumpulan data, sumber data, lokasi penelitian, strategi pemilihan informan, kapan mengumpulkan data, dan cara menganalisis hasilnya adalah contoh-contoh metodologi penelitian kualitatif.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Menurut Strauss dan Corbin (1990), penelitian kualitatif dilakukan tanpa menggunakan metode statistik atau kuantitatif selama proses penemuan. Istilah "teknik kualitatif" diciptakan oleh Bogdan dan Taylor (1975:4) untuk menggambarkan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, seperti transkrip wawancara, buku harian, atau jurnal, dan observasi tindakan orang. Metode penelitian kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang sebagian besar bersifat deskriptif, seperti

wawancara, kelompok fokus, dan observasi tindakan partisipan. Dalam kebanyakan kasus, penelitian kualitatif dilakukan dalam beberapa siklus. Siklus penelitian dalam penelitian kualitatif terdiri dari pemilihan proyek penelitian, merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan informasi yang relevan dengan pertanyaan, mengatur informasi yang diperoleh, dan melakukan analisis. Data yang dikumpulkan dan analisis terjadi secara bersamaan (ciri penelitian kualitatif yang memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan) dan menghasilkan wawasan yang lebih kaya dan dapat ditindaklanjuti.

Penelitian dengan berdasarkan metode penelitian kualitatif menggambarkan terkait data yang diambil dan dibuktikan berdasarkan fakta peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan pengamatan baik secara langsung, catatan, maupun deep interview dengan informan yang berkesinambungan dalam konteks peristiwa atau pelaku dalam studi kasus tersebut. Dalam kajian penelitian ini difokuskan dengan memperoleh data secara factual atau fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan partisipasi politik warga disabilitas di DKI Jakarta Pada Pemilu 2019, organisasi DPD Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN).

Desain pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini berkenaan dengan sesuatu studi kasus (*case study*) baik berdasarkan suatu masalah, kesulitan, hambatan, penyimpangan, maupun perwujudan kasus bukan berasal dari konteks yang dipaparkan tersebut melainkan karena adanya suatu prestasi; kemenangan; kesuksesan. Untuk tujuan ini, studi kasus menyelidiki kondisi, tindakan, dan perkembangan yang relevan, serta variabel kunci yang berkontribusi atau mendukungnya.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain,' kata Lofland (dalam Moleong, 2013: 157). Sumber data mencakup dua kategori yakni sumber data primer atau data yang diperoleh secara langsung baik dari informan maupun dari sumber yang berkaitan sebagai data utama dalam suatu penelitian.

a. Data Primer

Sumber data primer mencakup wawancara (*deep interview*) baik lisan maupun tulisan secara langsung terhadap informan utama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota DPD Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) di DKI Jakarta Tahun 2019-2022.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data yang didapati atau mengumpulkan dari laporan dokumen pendukung catatan terdahulu, dokumentasi, buku, jurnal, skripsi terdahulu yang berkesinambungan dengan konteks kajian penelitian yang dilakukan saat ini. Sumber data sekunder berupa dokumentasi, data pengurus, hasil rekapitulasi suara pemilih warga disabilitas Tunarungu DPD Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) di DKI Jakarta pada Pemilihan Umum 2019.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Strategi dalam penelitian melalui penggunaan metode pengumpulan data. Mengumpulkan data adalah prioritas utama saat ini dalam penyelidikan. Alat untuk Mengumpulkan Informasi dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan seperti metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan kerjasama tim diantara keduanya. Observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi menyeluruh sangat dihargai sebagai metode pengumpulan data. Observasi partisipan, wawancara mendalam, penelitian arsip, dan kajian pustaka merupakan metode pengumpulan data primer yang digunakan oleh peneliti kualitatif, sebagaimana dinyatakan oleh Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman (2005). Peneliti akademik tersebut berperan sebagai instrument dalam penelitian. Strategi mekanisme yang ditetapkan dalam pengumpulan data, diantaranya :

a. Observasi

Istilah "pengamatan" mengacu pada praktik menyimpan log rinci dari gejala yang diteliti (Usman dan Purnomo, 2004). Tindakan observasi didefinisikan sebagai melibatkan dua proses: biologis dan psikologis. Sejauh mana Anda terlibat dalam teknik observasiutamakan yakni mengunggulkan pengamatan serta pemahaman peneliti. Dalam konteks observasi sebagai teknik pengumpulan data penelitian, peneliti melakukan pengamatan berkaitan dengan kegiatan pendidikan atau edukasi politik dengan bentuk sosialisasi terkait pemilihan umum maupun pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Observasi tersebut dilakukan di DPD Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) DKI Jakarta.

b. Wawancara

Lincoln dan Guba (1988) menyoroti pentingnya wawancara dalam konstruksi berbagai entitas, seperti individu, kelompok, aktivitas, organisasi, emosi, motivasi, kesepakatan, dan kekhawatiran. Seperti yang didefinisikan oleh

Nazir (1999), wawancara adalah pertemuan satu lawan satu antara seorang peneliti (pewawancara) dan seorang peserta (responden), di mana mereka bertukar informasi melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban. wawancara dikategorikan menjadi dua jenis yaitu wawancara tak terstruktur atau wawancara secara intensif (lebih mendalam) dan wawancara terstruktur atau pertanyaan yang ditanyakan sesuai dengan urutan yang telah dikonsep secara tertulis dengan pilihan jawaban dalam bentuk terstandarisasi. Dalam teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara, peneliti melakukan dengan konsep wawancara terstruktur yakni secara tertulis dengan informan secara langsung di DPD Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) DKI Jakarta.

c. Studi Dokumen dan Literatur

Dokumentasi yang dicantumkan sebagai lampiran dalam skripsi ini yakni terkait logo organisasi Gerkatin, Lokasi Gerkatin DPD DKI Jakarta, Program kegiatan organisasi Gerkatin yang relevan dengan Bab 3, realisasi kegiatan yang relevan dengan bab 4, dan lampiran dokumentasi saat melakukan wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Pada analisis data kualitatif, Menurut Bogdan *Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others.* Analisis data merupakan teknik mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan rujukan lain, sehingga hasil analisis dengan mudah dipahami, temuan data dapat diinformasikan secara umum. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni hasil analisa berlandaskan data yang dicapai, dan diperluas menjadi suatu hipotesis, memperoleh data secara kontinue, Bukti baik mendukung atau menyangkal hipotesis dicapai. Menurut Miles dan Huberman (1984 : 23) analisis terdiri dari tiga kegiatan yang akan terjadi secara bersamaan. Tiga kegiatan tersebut diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mengarahkan, menghapus yang tidak penting, dan menyusun data dengan versi sedemikian rupa sehingga akhir kesimpulan dapat ditarik dan dibuktikan. Dalam reduksi ini mendapati dua jenis proses yakni *living in* dan *living out*. *living in* disebut dengan data yang terpakai atau digunakan sedangkan *living out* dikenal dengan data yang tidak terpakai atau tidak digunakan.

b. Penyajian Data

Penyajian dianggap sebagai sekumpulan pengetahuan dari mana kesimpulan dapat ditarik dan tindakan diambil. Data dari studi kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk diagram alur, hubungan kategori, dan narasi singkat. Dengan menunjukkan data, selanjutnya dapat melancarkan dalam mempelajari apa yang terjadi, merencanakan proses setelahnya berdasar atas sesuatu hal yang sudah dipelajari.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan inti dari cakupan penelitian yang mengilustrasikan gambaran tinjauan akhir penelitian berlandaskan pendekatan berdasarkan induksi atau deduksi. Penekanan dan tujuan penelitian mendikte pentingnya temuan. serta cakupan penelitian yang telah diinterpretasi dalam ulasan analisis penelitian. Kesimpulan sebagai inti teoritik atau empirik hasil akhir dari perkara penelitian yang dipecahkan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi mempermudah dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran secara garis besar yang tercakup kedalam enam bab, yakni :

- **BAB I Pendahuluan**

Bab ini mencakup latar belakang sebagai penjelasan permasalahan penelitian secara konkret yang akan dikaji oleh peneliti dan disampaikan kepada pembaca. Rumusan masalah yang berisi paparan pertanyaan yang dikaji dalam penelitian ini. Tujuan penelitian sebagai penjabaran tujuan dalam penelitian ini. Manfaat penelitian sebagai kegunaan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka yang berisi kesaamaan kajian dalam konteks penelitian yang serupa. Metode penelitian yang menjelaskan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian serta penulisan laporan tugas akhir skripsi ini secara rinci.

- **BAB II Kerangka Teori**

Pada bab ini mengidentifikasi intens terkait teori Partisipasi Politik Milbrath dan teori Peran Politik SarlitoWirawan Sarwonod igunakan dalam mengkaji problematika yang akan diteliti. Kerangka teori ini sebagai kerangka berpikiran guna analisa temuan hasil penelitian ini.

- **BAB III Gambaran Umum dan Pembinaan GerkatIn Terhadap Disabilitas**

Pada bab ini menggambarkan secara umum objek pada penelitian. Gambaran umum penelitian mencakup : sejarah singkat berdirinya organisasi Gerakan untuk kesejahteraan Tunarungu Indonesia, visi misi organisasi Gerakan untuk kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Tujuan organisasi Gerakan untuk kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Landasan hukum organisasi Gerakan untuk kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Struktur organisasi Gerakan untuk kesejahteraan Tunarungu Indonesia, dan lokasi organisasi Gerakan untuk kesejahteraan Tunarungu Indonesia.

- **BAB IV Analisis Partisipasi Politik Warga Disabilitas DKI Jakarta Dalam Pemilu 2019**

Pada bab ini menjelaskan secara detail mengenai analisa temuan hasil penelitian berupa faktor determinan dalam meningkatkan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di DKI Jakarta sebagai perwujudan dari teori partisipasi politik Milbrath.

- **BAB V Analisis Peran Politik DPD GERKATIN DKI Jakarta Dalam Pemilu 2019**

Bab analisa data penelitian menjabarkan detail valid invensi data penelitian perwujudan dari teori peran politik Sarlito mengkaji peran politik komunitas GerkatIn dalam mendampingi warga disabilitas dalam Pemilu 2019 di DKI Jakarta.

- **BAB VI Penutup**

Bab ini memuat kesimpulan hasil analisa temuan penelitian mencakup faktor determinan karakteristik pribadi dan karakteristik sosial serta peran politik yang dibina dan dikembangkan oleh organisasi Gerakan untuk kesejahteraan Tunarungu Indonesia DPD DKI Jakarta pada Pemilu 2019. Saran sebagai solusi pandangan peneliti terhadap berbagai pihak, lembaga, pemerintah berdasar atas hasil temuan penelitian dan permasalahan yang telah dikaji .

- **Daftar Pustaka**

Bab ini mencantumkan daftar referensi pendukung dalam penyusunan penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

1. Partisipasi Politik

Budaya politik lokal di Indonesia merupakan faktor penting dalam membentuk tingkat keterlibatan politik di kalangan penduduk. Dampak ini masih terkait dengan pola historis interaksi antara kekuatan konservatif dan progresif. Gagasan patrimonial dan ikatan patron-klien adalah fondasi otoritas tradisional. (Noer 2003:29).

Miriam (1998:3) berpendapat bahwa partisipasi aktif warga negara dalam proses politik merupakan aktualisasi kekuasaan politik yang sah dalam suatu masyarakat. Asumsi bahwa kepentingan masyarakat dapat diarahkan melalui tindakan bersama memberikan kepercayaan pada gagasan bahwa keterlibatan politik di pihak masyarakat penting untuk keberhasilan proses politik. Menurut terminologi sosiologi politik, semakin banyak orang dalam suatu komunitas yang terlibat dalam proses politik, maka upaya komunitas untuk mendidik anggotanya tentang politik telah efektif. Politik, dalam pandangan dunia sosiologi politik, dipandang sebagai upaya mempertahankan penderitaan dan pemerataan. Dengan demikian, partisipasi politik dianggap sebagai suatu hal yang pokok, karena partisipasi politik merupakan bagian dari konsep politik dalam menegakkan suatu keadilan dan ketertiban.

Partisipasi politik pada dasarnya sebagai suatu perwujudan perbuatan atas kehendak sendiri, dilatarbelakangi dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari orang lain. Lantaran hal tersebut, partisipasi politik terpaut erat melalui pemahaman yang berhubungan dengan edukasi politik masyarakat maupun pemilih dalam kegiatan politik tersebut. Partisipasi politik sebagai prasyarat yang sepenuhnya pada suatu sistem politik yang demokratis. Sistem politik yang bersih mengikuti terungkapnya saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi warga. Partisipasi politik di negara yang demokrasi dipastikan sebagai hak bagi setiap warga negara, namun tiap-tiap negara memiliki takaran partisipasi politik yang berlainan, dengan kata lain tidak semua warga negara terlibat di dalam proses pemilu. Sebagai warga negara di negara yang demokrasi, filosofi partisipasi politik yakni kewenangan berada di tangan masyarakat yang dilangsungkan bersama guna menentukan haluan masa depan serta memastikan calon pemimpin negara. Pemilih dalam pemilihan umum akan memilih partai politik yang dipandang sanggup mewakili suara dan aspirasi masyarakat. Semakin banyaknya pemilih memilih suatu partai politik maka akan semakin terbuka luas peluang partai tersebut untuk mengungguli dalam pemilihan umum.

Pendekatan *psikologi* atau pendekatan Michigan, mendasarkan kepada faktor psikologi atau sikap yaitu yang mempengaruhi perilaku memilih seseorang seperti hubungan seseorang dengan sebuah partai politik, perasaan seseorang terhadap calon Presiden atau wakil masyarakat yang bertanding dan pengaruh isu-isu politik saat itu. Pendekatan *psikologi sosial*, berdasarkan kepada identifikasi partai, yaitu persepsi pemilih memilih partai tertentu karena kedekatan dengan partai. Setiap suara pemilih ini akan memilih partai tertentu dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain. Pendekatan rasional lebih ditujukan kepada faktor untung atau rugi bagi seseorang jika memilih sebuah partai. Pendekatan ekonomi politik rasional dikemukakan oleh Melweit dikenal juga sebagai pendekatan *Consumer Model of Party Choice*. Pendekatan ini mendasarkan pengaruh taraf ekonomi negara berkaitan erat dengan pola pemilihan. Apabila perkembangan ekonomi pesat dan masyarakat memperoleh keuntungan yang besar, masyarakat akan memilih partai pemerintah yang dianggap telah mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menghindari kerugian. Oleh karena itu, pemilih menilai suasana isu-isu politik yang diutarakan pada masa tersebut yang artinya, pemilih akan memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keuntungan atau kerugian yang rasional (nyata).

Partisipasi politik di negara demokrasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Partisipasi politik digolongkan menjadi dua, (1) partisipasi individu yang dilakukan oleh seseorang. (2) partisipasi yang dilakukan secara bersama-sama dengan mempengaruhi kedudukan pihak berkuasa seperti pemilu (Sastroatmodjo, 1995:9). Pandangan umum masyarakat sebagai pelaku pemilih dalam proses politik pada pemilu, partisipasi politik diyakini sebagai suatu kegiatan yang akan membawa dampak positif dalam suatu kebijakan untuk masyarakat. Partisipasi politik memiliki tingkatan nilai atau peringkat dalam bagan piramid. (1) peringkat paling atas atau penggerak, yaitu tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh partai politik. (2) Peringkat menengah atau kader, yaitu pengurus atau anggota aktivis yang aktif di dalam partai dan masyarakat. (3) peringkat paling bawah atau simpatisan, yaitu menghadiri kampanye, mencoblos dalam pemilu, kepedulian berpolitik, mempunyai perhatian terhadap perkembangan politik.

Di negara demokrasi, partisipasi politik dilakukan oleh mayoritas seluruh masyarakat. Maka dalam hal ini, partisipasi politik masyarakat sebagai warga negara demokrasi dapat dikatakan sangat baik. Namun, di sisi lain apabila masyarakat apatis atau kurang berpartisipasi dalam proses politik disebabkan dengan adanya kepemimpinan yang otoriter di suatu negara demokrasi. Dalam kondisi negara demokrasi, segala kedaulatan berada di tangan masyarakat. Dalam hal tersebut dapat diartikan, partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang penting dalam membangun atau menciptakan suatu negara yang demokrasi dan segala proses politik masyarakat terlibat didalamnya. Di negara berkembang, partisipasi

masyarakat mencapai tahap sangat tinggi, hal ini didorong dengan adanya unsur paksaan oleh pemerintah untuk mewajibkan memilih partai pemerintah.

Partisipasi politik diiringi dengan faktor determinan sebagai pendorong dalam meningkatkan partisipasi politik. Milbrath (1965) memahami partisipasi politik baik dari segi karakteristik individu maupun faktor eksternal. Ciri-ciri individu yang dipertimbangkan adalah usia, ras, jenis kelamin, agama, atau lokasi yang umum dipelajari, tetapi terutama ciri-ciri kepribadian. Intuisinya adalah bahwa tergantung pada karakteristik pribadi, seseorang lebih atau kurang mungkin terlibat secara politik, dan sedikit banyak dipengaruhi oleh lingkungan politik dan rangsangannya.

Milbrath (1965) mengonseptualisasikan partisipasi dalam cara hirarkis: "orang yang terlibat dalam perilaku teratas sangat mungkin untuk melakukan yang lebih rendah dalam peringkat juga" (p.17-8). Ini adalah pemahaman kumulatif tentang partisipasi politik, sering digambarkan dengan menggunakan metafora piramida atau tangga (Benneyet al., 1956; Milbrath, 1960, 1965; Kuroda, 1965; Froman, 1961). Orang dipahami terlibat dalam semua kegiatan politik sampai batas tertentu, meskipun tidak harus dalam waktu yang bersamaan. Mengikuti kerangka kerja Milbrath, ambang batas ini dipengaruhi oleh rangsangan eksternal dan komunikasi interpersonal, tetapi juga karakteristik individu, seperti kemampuan bersosialisasi atau status sosial ekonomi.

Milbrath (Maran, 2007) terdapat dua faktor utama yang menjadi faktor pendorong untuk seseorang ikut berpartisipasi dalam ranah kegiatan politik faktor pendukung dalam hal ini menjadi acuan dalam peningkatan partisipasi politik yang tentunya akan dibahas dan dicakup dalam kajian penelitian skripsi ini. Faktor pendukung yang menjadi faktor determinan dalam mendorong peningkatan partisipasi politik tersebut diantaranya : (1) Karakteristik pribadi, (2) Karakteristik sosial, (3) Perangsang politik, (4) Pendidikan politik.

Milbrath mengambil gagasan piramida mungkin lebih jauh dari orang lain. Keterlibatan dalam politik dikonseptualisasikan dalam tingkatan yang berbeda-beda, memungkinkan keterlibatan yang lebih atau kurang intensif.



Gambar.1.2 Piramida Partisipasi Politik

Sumber : Milbrath, 1965

Partisipasi politik adalah urusan individu, individu berkomunikasi satu sama lain, mereka juga tunduk pada rangsangan politik eksternal, orang memiliki karakteristik yang berbeda, karakteristik ini berarti bahwa dampak rangsangan dan interaksi bervariasi dari orang ke orang (layar persepsi). Pengaruh interaksi personal lebih kuat daripada rangsangan eksternal (Milbrath & Goel, 1977). Perpindahan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya dalam hierarki tergantung pada karakteristik individu dan dipahami dalam hal ambang batas. Warga negara yang sangat pasif tidak mungkin terlibat dalam politik sejak awal, atau seseorang yang tidak nyaman dengan tindakan politik terbuka. Dalam setiap siklus, individu dikenai rangsangan tertentu (p), dan juga diatur untuk berinteraksi dengan probabilitas tertentu yang keduanya mempengaruhi warga dan karakteristik mereka. Naik atau turunnya tangga partisipasi politik dipengaruhi oleh interaksi interpersonal dan stimulus eksternal. Individu dengan berbagai karakteristik yang mempengaruhi kecenderungan mereka untuk terlibat dalam tindakan politik. Bergantung pada sifat individu, agen lebih atau kurang rentan terhadap perubahan tersebut. Karakteristik yang dimodelkan didasarkan pada Milbrath (1965).

Selain karakteristik pribadi, sejumlah faktor dicatat untuk setiap agen: status sosial ekonomi (SES), jumlah kontak di komunitas, serta waktu yang dihabiskan di komunitas. Sama seperti ciri-ciri kepribadian, ini dipahami sebagai sebuah kontinum, yang direpresentasikan dalam simulasi sebagai angka mengambang tunggal. Angka mengambang digunakan agar pengaruh kecil dapat terakumulasi dari waktu ke waktu. Lingkungan politik yang berbeda mempengaruhi hasil keseluruhan dari partisipasi politik. Secara khusus, lebih banyak rangsangan dianggap mengarah pada lebih banyak partisipasi secara keseluruhan (Milbrath, 1965; Milbrath & Goel, 1977).

Lingkungan politik yang berbeda secara konsisten mengarah pada hasil yang sangat berbeda. Interaksi antar individu secara implisit digambarkan sebagai putaran umpan balik positif, mendorong mereka yang sudah terlibat lebih dalam. Kerangka kerja Milbrath memiliki keuntungan untuk melayani fakta bahwa orang-orang selektif dalam jenis pesan apa yang mereka terima, lebih banyak rangsangan harus ditandai secara khusus pada tingkat yang lebih tinggi perlu dikualifikasikan: Efek rangsangan yang diperkuat oleh interaksi pribadi yang tampaknya mengarah pada peningkatan partisipasi. Pendidikan individu dianggap sebagai faktor kunci yang menentukan partisipasi politik (Lane, 1959; van Deth, 1997; Verbaet al., 1995; Crotty, 1991). Secara khusus, rendahnya tingkat pendidikan diharapkan berhubungan dengan rendahnya tingkat partisipasi politik dan lingkungan politik yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda (Milbrath, 1965; Milbrath & Goel, 1977).

Pengaturan pemilu hampir selalu dianggap sebagai faktor utama yang menentukan tingkat partisipasi politik (Milbrath, 1965; Milbrath & Goel, 1977; Powell, 1986) (H8). Regulasi dianggap memfasilitasi dan menghambat partisipasi, tergantung pada sifatnya. Untuk menguji peran regulasi, waktu yang dibutuhkan sampai seorang individu diizinkan untuk berpartisipasi bervariasi. Ini mencerminkan undang-undang pendaftaran di tempat yang berbeda. Segi kewajiban moral dalam kewarganegaraan, meskipun di sebagian besar masyarakat tidak ada persyaratan hukum untuk berpartisipasi dalam politik atau masyarakat sipil. Simulasi dapat menguji budaya politik yang berbeda karena jumlah orang yang merasa berkewajiban untuk berpartisipasi dapat bervariasi. Hasilnya berbeda secara signifikan dengan tingkat individu dan pemilih apatis yang paling terpengaruh. Namun, perbedaan yang lebih kecil namun signifikan di tingkat yang lebih tinggi juga dapat ditemukan di tingkat yang lebih tinggi: terutama untuk tingkat keanggotaan partai.

Peran lingkungan dan komunitas dalam partisipasi politik terkadang ditekankan: mereka yang memiliki akar dalam komunitas ditemukan lebih terlibat secara politik (Milbrath, 1965; Peterson, 1990; Jalur, 1959; van Deth, 1997; Verbaet al., 1995) (H9). Akar dalam komunitas dapat dianggap lebih spesifik sebagai waktu yang dihabiskan dalam komunitas (Stone & Schaffner, 1988; Davidson, 1994; Peterson, 1990; Warr, 1970). Konsekuensinya, waktu yang dihabiskan dalam suatu komunitas dapat diharapkan terkait dengan partisipasi politik. Intuisinya adalah dengan lebih banyak waktu yang dihabiskan di komunitas, individu mengidentifikasi dengan tempat itu, dan dengan demikian lebih peduli tentang lokalitas. Dengan itu, kemungkinan partisipasi politik meningkat. Secara khusus, semakin banyak kontak yang dimiliki seseorang, diharapkan akan semakin tinggi tingkat partisipasi politiknya (Berelson et al., 1954; Jalur, 1959). Individu secara bertahap membangun partisipasi pada tingkat yang lebih tinggi, dan umumnya tidak ada lompatan besar dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah atau sebaliknya. Pola partisipasi ini dapat dipahami sebagai individu yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam politik.

Model partisipasi politik Milbrath menekankan ciri dan struktur kepribadian. Bagian dari perkembangan teoretis sejak model ini dirumuskan adalah lebih memperhatikan agensi individu. Ciri-ciri yang diperlukan pada setiap perubahan tingkat dipahami secara kumulatif, dan begitu ambang batas tertentu tercapai, individu dianggap telah mencapai setidaknya tingkat partisipasi politik tersebut. Interaksi pribadi memang merupakan faktor kunci dalam memobilisasi orang ke dalam tindakan politik (lihat juga Nedelmann, 1987). Rotolo dan Wilson (2004) menyatakan bahwa terjadi penurunan dalam interaksi pribadi, meningkatnya kekhawatiran akan partisipasi dalam masyarakat sipil dan politik pada khususnya. Unsur yang pertama dalam faktor pendorong determinan partisipasi politik yakni Faktor karakteristik pribadi dimaknai sebagai suatu faktor yang berasal dari karakteristik dalam diri pribadi seorang pemilih berdasar atas rasa semangat dan rasa kepedulian yang tinggi untuk ikut serta atau berpartisipasi terhadap suatu kegiatan politik. Faktor karakteristik pribadi ini terbentuk atas keinginan yang besar dari dalam diri pribadi masing-masing tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain.

Unsur yang kedua yakni, Faktor karakteristik sosial dimaknai sebagai suatu faktor yang berasal dari karakteristik dalam lingkup sosial yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi untuk ikut serta atau berpartisipasi terhadap suatu kegiatan politik. Faktor karakteristik sosial ini terbentuk atas pengaruh dari adanya kesamaan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan). Unsur yang ketiga yakni, Faktor perangsang politik dimaknai sebagai suatu faktor yang terbentuk karena adanya pengaruh diskusi-diskusi politik dan informasi politik melalui media massa untuk menarik perhatian khusus dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu. Unsur pendorong faktor determinan yang keempat yakni Faktor pendidikan politik sebagai salah satu faktor determinan yang terbentuk karena adanya bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dijalankan untuk persiapan dalam pemilu. Faktor pendidikan politik yang dijalankan dapat menunjang peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu yang diselenggarakan. Besarnya ketertarikan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh badan atau lembaga dibawah naungan pemerintah untuk bertanggungjawab dalam persoalan pemilu, maka akan semakin tinggi pola pemahaman dan tingkat partisipasi politik pemilih pada pemilu.

2. Peran Politik

Peran politik merupakan bagian dari teori peran (*Role Theory*). Dalam buku teori psikologi sosial, teori peran (*Role Theory*) merupakan teori perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu (Sarlito Wirawan Sarwono: 1983). Istilah "Peran" diambil dari dunia teater. Didefinisikan sdalam lingkup teater sebagai seorang tokoh tertentu dan diharapkan memiliki posisi berperilaku secara tertentu sebagai seorang aktor sebagaimana halnya sebagai

seorang tokoh atau aktor berada dalam kaitan aktor yang lainnya berdasarkan sudut pandang yang dijalankannya atau setara dengan teori-teori peran.

Biddle & Thomas (1966) , teori peran terbagi dalam empat golongan yaitu diantaranya : (1) orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. (2) perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. (3) kedudukan orang-orang dalam perilaku. (4) kaitan antara orang dan perilaku. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial terbagi menjadi dua yakni, Aktor (tokoh yang berperilaku terhadap suatu peran tertentu) dan Target (sasaran) atau orang lain (*other*) yang memiliki keterikatan perilaku dengan tokoh aktor . Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut yaitu diantaranya : (a) *expectation* atau harapan tentang peran yang ditunjukkan orang lain tentang berperilaku yang segoianya. (b) *norm* atau norma yang bersifat meramalkan (*anticipatory*) tentang suatu perilaku yang akan terjadi dan norma harapan normatif yang mencakup harapan terselubung (*covert*) dan harapan yang terbuka (*overt*). (c) *performance* atau wujud perilaku dalam peran yang diwujudkan dalam perilaku nyata oleh aktor bukan sekedar harapan atau norma. Perwujudan peran terbagi dalam tujuh golongan menurut intensitasnya yang diukur berdasarkan keterlibatan diri (*self*). Tingkat intensitas paling rendah merupakan pelaku atau aktor sangat tidak terlibat. Sedangkan tingkat paling tinggi terjadi jika aktor sebagai pelaku yang melibatkan seluruh peran perilakunya. (d) *evaluation* (penilaian) dan *sanction*(sanksi). Penilaian dan sanksi yang dapat menentukan pandangan positif maupun pandangan negative terhadap suatu perilaku aktor. Penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (eksternal) maupun diri sendiri (internal).

Fungsi normatif teori peran menekankan pada standar tertentu bagi perilaku atau kepercayaan anggota. Secara garis besar, suatu kelompok mempunyai cukup kekuatan atas individu sehingga individu mengikuti standar ketentuan tersebut. Fungsi komparatif menekankan bahwa kelompok sebagai alat pembanding bagi individu dengan melibatkan diri dalam kelompok. Kaitan aktor dengan perilaku berdasarkan atas beberapa criteria diantaranya: (1) kriteria kesamaan. Pada kriteria kesamaan tergolong atas diferensiasi (*differentiation*) merupakan norma untuk suatu kelompok sosial tertentu dan *consensus* (*consensus*) merupakan kaitan antara perilaku-perilaku berupa kesepakatan mengenai hal tertentu. (2) derajat saling ketergantungan atau hubungan orang (aktor) dengan perilaku yang akan mempengaruhi, menyebabkan, atau menghambat kaitan yang lain. (3) gabungan antara deraja kesamaan dan saling ketergantungan. Pada kaitan ini terbagi atas beberapa konteks diantaranya: (a). konformitas (*conformity*) yaitu kesesuaian antara perilaku atau harapan dengan perilaku orang lain. (b). penyesuaian (*adjustment*) atau konformitas didasari oleh kesamaan perilaku dengan perilaku maupun perilaku dengan norma. (c). kecermatan (*accuracy*) tentang ketepatan penggambaran suatu peran.

Pada suatu proses politik, peran politik sangat penting dalam segala kegiatan pada suatu proses politik. Peran politik di negara demokrasi terdapat beberapa macam aspek diantaranya: peran politik yang dilakukan oleh pemerintah, peran politik yang dilakukan oleh partai, dan peran politik yang dilakukan oleh lembaga tertentu. Peran politik tentunya tidak terlepas dari teori peran. Peran politik erat kaitannya dengan pelaku (aktor) terhadap suatu perilaku yang dijalankan. Fungsi normatif pada teori peran berkaitan dengan peran politik sebagaimana halnya suatu kelompok mempunyai cukup kekuatan atas individu sehingga individu mengikuti standar ketentuan tersebut. Pandangan umum politik, lembaga, partai, maupun pemerintah memiliki dedikasi yang cukup kuat atas individu mengatur seluruh kebijakan, maupun mengatasi segala problematika yang menyimpang dari segala kebijakan, norma, dan pedoman peraturan.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PEMBINAAN GERKATIN TERHADAP DISABILITAS

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Berdirinya Organisasi Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia

Sebelumnya ada beberapa komunitas organisasi tuna rungu Indonesia yang bersifat kedaerahan yang telah terbentuk pada tahun 1960 antara lain : Bandung dengan nama SEKATUBI (Serikat Kaum Tuli Bisu Indonesia), Semarang dengan nama PTRS (Persatuan Tuna Rungu Semarang), Yogyakarta dengan nama PERTRI (Perhimpunan Tuna Rungu Indonesia), Surabaya dengan nama PEKATUR (Perkumpulan Kaum Tuli Surabaya). Sehubungan banyaknya komunitas organisasi tuna rungu yang bersifat kedaerahan, maka beberapa pimpinan organisasi tersebut sepakat mengadakan Kongres Nasional I pada tanggal 23 Februari 1981 di Jakarta.



Gambar 1.3 Logo GERKATIN
Sumber : Website GERKATIN

Hasil Kongres telah menghasilkan beberapa keputusan diantaranya menyempurnakan nama organisasi menjadi satu yaitu GERKATIN kepanjangan dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia dalam bahasa Inggrisnya yaitu IAWD (*Indonesian Association for the Welfare of the Deaf*). Dalam perkembangan selanjutnya, GERKATIN/IAWD telah terdaftar sejak tahun 1983 sebagai anggota WFD (*World Federation of the Deaf*) dengan kata lain Federasi Tuna Rungu se-Dunia dan bermarkas di Helsinki, Finlandia. Visi Misi Organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia

2. Visi Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN)

1. Mencapai kesetaraan kesempatan dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan.
2. Menciptakan organisasi tuna rungu yang madani.
3. Menjadi organisasi Nasional yang bermitra dengan Pemerintah dan Non Pemerintah untuk mewujudkan tercapainya kesetaraan dalam kesempatan, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi tuna rungu dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Misi Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN)

1. Memberdayakan tuna rungu agar dapat turut berperan aktif selaku insane pembangunan yang berintegrasi, mandiri dan produktif di era globalisasi.
2. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat umum melalui media sosial dan informasi tentang kemampuan tuna rungu menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi.
3. Meningkatkan peran tuna rungu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Meningkatkan fungsi Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) sebagai bahasa utama di antara para tuna rungu dengan non tuna rungu dalam berkomunikasi.

3. Tujuan Organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN)

Tujuan didirikannya organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) sebagai berikut :

1. Menggali dan meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) tuna rungu Indonesia.
2. Berperan aktif membantu melaksanakan usaha-usaha pemerintah dalam program pengembangan kesejahteraan sosial bagi tuna rungu di Indonesia.
3. Mengupayakan pemenuhan hak-hak tuna rungu Indonesia
4. Membentuk lembaga atau badan usaha demi menunjang kesejahteraan tuna rungu Indonesia.

4. Landasan Hukum Organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN)

- Hasil Kongres Nasional I GERKATIN Tahun 1981
- Akta Notaris Anasrul Jambi Nomor 12 tertanggal 05 Maret 1985

- Pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 192/D.III.2.VII/2009 tertanggal 30 Juli 2009
- Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor Register AHU-166.AH.01.06 Tahun 2010 tertanggal 20 Desember 2010
- Undang-Undang No.19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

5. Struktur Organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN)

Dewan Pertimbangan Organisasi Pusat

- Ketua : Ir.H. Aprizar Zakaria

Dewan Pengurus Pusat

- Ketua Umum : Bambang Prasetyo
- Wakil Ketua : Juniati Effendi
- Sekretaris : Tori Hermawan
- Wakil Sekretaris : Wilma Redjeki
- Bendahara : Dhita Indriyanti
- Wakil Bendahara : Ahmad Ridwan Rais

Koordinator Bidang

- Pendataan Data : Clara Ghetta Aktalisa
- Pendidikan dan Pengajaran : Andrew E.Z Sihombing
- Pemberdayaan Perempuan : Michelle Stella
- Peliputan Kegiatan : Stefanus Sinar
- Kepemudaan dan Pemberdayaan anak : Siti Rodhiyah
- Kesejahteraan dan Kesehatan : Nancy Vivienne
- Manajemen dan Organisasi : Dimas Hendrayanto
- Aksesibilitas Pelayanan Publik : Nasruddin
- Bantuan Hukum, Peradilan Hak Politik : Andika Panji
- Tenaga Kerja Kewirausahaan : Ricendy Januardo
- Kesenian dan Olahraga : Hervita El
- Penanggulangan kebencanaan : Intan Adelia
- Hubungan Masyarakat : Fedayen Alqowasi
- Hubungan Luar Negeri : Iwan Satryawan

6. Lokasi Organisasi Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN)
Dewan Pengurus Daerah DKI Jakarta

GerkatIn merupakan organisasi untuk mensejahterakan penyandang disabilitas (Tuna Rungu) di Indonesia. Secara administratif Dewan Pengurus Pusat (DPP) organisasi GerkatIn tertletak di Jl. Rancho Indah Dalam No.47 BC Tanjung Barat-Jakarta Selatan. Kantor sekretariat Dewan Pengurus Daerah DPD GerkatIn DKI Jakarta terletak di alamat: Jln. Haji Ung RT.001/RW.04 No.296 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.



Gambar 1.4 Lokasi Sekretariat GerkatIn DPD DKI Jakarta

Sumber : Lapangan

B. Pembinaan GerkatIn Terhadap Disabilitas

GerkatIn merupakan organisasi tuna rungu yang bermitra dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk tercapainya suatu kesetaraan dan kesejahteraan terhadap kehidupan tuna rungu. GerkatIn sebagai organisasi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan tuna rungu sudah menuai banyak prestasi dalam pembinaan terhadap disabilitas. Prestasi GerkatIn diantaranya sebagai berikut :

- GerkatIn terpilih sebagai tuan rumah oleh federasi tunarungu se-Dunia kawasan Asia Pasifik untuk pertemuan delegasi tunarungu se-Asia Pasifik ke XVI pada Desember 2004 di Hotel sari Pan Pasifik.
- GerkatIn terpilih sebagai tuan rumah oleh federasi tunarungu se-Dunia kawasan Asia Pasifik untuk pertemuan rapat kepemudaan tunarungu se-Asia Pasifik ke IV pada Juni 2008 di Hotel Twin Plaza.

- Ketua umum DPP Gerkatina mewakili tunarungu sebagai ketua pelaksana penyelenggaraan Hari Internasional Cacat tahun 2008 di Istana Merdeka Jakarta.
- Ketua umum DPP Gerkatina mewakili organisasi Gerkatina sebagai ketua panitia pelaksana Hari Disabilitas Internasional tahun 2018 di Bekasi, Jawa Barat.

Program kerja Gerkatina dalam pembinaan terhadap disabilitas

1. Perayaan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2022 di Banten



Gambar 1.5 Hari bahasa isyarat internasional
Sumber : Dokumentasi website Gerkatina

Hari Bahasa Isyarat Indonesia dengan tema "Bahasa Isyarat Menyatukan Kita" bersama Gerkatina DPD Provinsi Banten sebagai tim panitia dan dihadiri 100 disabilitas tuna rungu pada hari Minggu, 25 September 2022 di Alun-alun Kota Tangerang. Peserta disabilitas tuna rungu dalam acara ini menggunakan dress code hijau dengan maksud memiliki harmoni dalam kehidupan, keseimbangan pikiran, dan membawa kedamaian. Acara tersebut memberikan penjelasan berupa budaya tuli, bahasa isyarat, dan menghormati hak disabilitas tuna rungu untuk berjuang mendapatkan akses bahasa isyarat seluruh dunia.

2. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Tuli atau Tunarungu



Gambar 1.6 Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Tuli/Tunarungu
Sumber : Dokumentasi website Gerkatina

Pelatihan pemberdayaan perempuan tuli atau tunarungu dengan tema "Harkat dan Martabat Perempuan Disabilitas Rungu/Tuli" bersama 20 orang perempuan disabilitas rungu/tuli Se-Jabodetabek dengan narasumber diantaranya : Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan *Disability Rights Fund (DRF)* pada 29-30 Juli 2022 di Hotel 88, Jakarta Barat. Pelatihan ini disampaikan materi tentang :

- a. Kekerasan, Diskriminasi Perempuan Disabilitas Rungu/Tuli
- b. Prinsip Dasar Pertolongan Pertama Psikologi
- c. Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Berbasis Gender, PSEAH Umum
- d. PSEAH khusus GerkatIn

3. Pelatihan Soft Skill untuk SDM Tuli



Gambar 1.7 Pelatihan Soft Skill untuk SDM Tuli

Sumber : Dokumentasi website GerkatIn

GerkatIn menyelenggarakan pelatihan soft skill berkolaborasi dengan PUSBISINDO untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pelatihan ini mencakup skill pengoperasian diantaranya Google Classroom, Zoom, Google Form, Ms. Power Point, Ms. Excel untuk menunjang pengoperasian sistem computer maupun pengajaran secara daring atau online. Pelatihan soft skill ini diikuti oleh 36 orang peserta disabilitas tunarungu atau tuli pada 1 November-18 Desember 2022 di Zoom meet. Topik pembahasan dalam konteks dasar penting peran tenaga pendidik atau guru diantaranya :

- a. Pemerolehan Bahasa
- b. Pengajaran Bahasa Isyarat terhadap dewasa dan anak-anak
- c. Kode Etik
- d. Perbedaan cara ajar dewasa dan anak-anak

4. Webinar Kesehatan Mental untuk Tuli



Gambar 1.8 Webinar Kesehatan Mental untuk Tuli

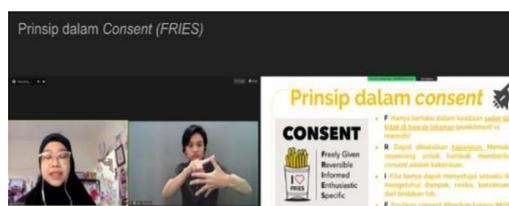
Sumber : Dokumentasi website GerkatIn

GerkatIn menyelenggarakan webinar kesehatan mental untuk tuli didorong dengan adanya faktor dari data yang terlampir pada awal tahun 2021 terdapat kasus 10 orang tuli meninggal dunia, 3 kasus orang tuli bunuh diri dengan gantung diri, 2 orang tuli meninggal dunia karena COVID-19 dan yang lain karena sakit. Webinar kesehatan mental diselenggarakan dengan bantuan DRF (*Disability Rights Fund*). Webinar ini dengan tema "Cintailah Dirimu" dihadiri oleh 90 orang peserta pada Februari 2021. Sub tema dalam webinar ini diantaranya :

- a. Hari pertama, sub tema "Pengantar tentang kesehatan mental untuk tuli"
- b. Hari kedua, sub tema "Bagaimana kita menghadapi kesehatan mental kita ?"
- c. Hari ketiga, sub tema "Stress dan cara penanganannya"
- d. Hari keempat, sub tema "Bagaimana cara merawat diri"

Hasil webinar ini dengan adanya pendirian tempat konsultasi untuk tuli dengan ketentuan bisa berisyarat dan ada juru bahasa isyarat.

5. Webinar Perlindungan Diri dari Kekerasan Seksual



Gambar 1.9 Webinar Perlindungan Diri dari Kekerasan Seksual

Sumber : Dokumentasi website GerkatIn

DPP GerkatIn bidang kewanitaan menyelenggarakan webinar ini dengan pemaparan tentang "Perlindungan diri dari kekerasan seksual" Pemaparan tersebut dikaji dalam konteks prinsip Freely-given, reversible, informed, enthusiastic dan specific (FRIES), contoh pelaku, bentuk dan dampak kekerasan seksual dan cara-cara menolak dengan baik dan tegas. Webinar ini diikuti oleh 50 orang peserta pada Sabtu, 26 Februari 2022 di Zoom meeting.

6. Pelatihan bersama Federasi Dunia Tuli dan Seminar Advokasi "Peluang dan Tantangan bagi Negara untuk Bahasa Isyarat Indonesia



Gambar 1.10 Pelatihan bersama Federasi Dunia Tuli dan Seminar Advokasi "Peluang dan Tantangan bagi Negara untuk Bahasa Isyarat Indonesia
Sumber : Dokumentasi website GerkatIn

GerkatIn bersama Federasi Tuli Dunia (World Federation of The Deaf) dan Pusbisindo disponsori oleh Nippon Foundation menyelenggarakan pelatihan dalam memahami UU No.8 Tahun 2016 dan CRPD. Pelatihan ini diakhiri dengan seminar advokasi dengan tema "Peluang dan Tantangan bagi Negara untuk Meresmikan Bahasa Isyarat Indonesia". Pelatihan ini dihadiri oleh 14 peserta melalui seleksi dari lintas daerah dengan ketentuan umur 18-40 tahun dan mampu berbahasa isyarat internasional dan Bisindo yang baik.

7. Hari Bahasa Isyarat Internasional Kubu Raya Bentuk Kelas Trainer Penyandang Difabel



Gambar 1.11 Hari Bahasa Isyarat Internasional Kubu Raya Bentuk Kelas Trainer Penyandang Difabel
Sumber : Dokumentasi website GerkatIn

Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional menjadi momentum lahirnya pendidikan Bahasa Isyarat Indonesia. Prakarsa ini diikuti oleh Federasi Tunarungu Dunia

atau World Federation of The Deaf (WFD). Launching TOT atau Training of Trainer menjadi suatu fasilitas di bidang pendidikan dan berdampak kepada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Peringatan ini dihadiri oleh komunitas pemuda, forum anak daerah, dinas terkait dan pemerhati bergerak dalam satu visi. TOT ini nantinya akan dibuka 2 kelas dan dalam 1 kelas diisi sebanyak 15 orang peserta dengan melibatkan Bisindo sebagai tim pengajar. Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional dan Launching Training of Trainer diselenggarakan pada 23 September di Kalimantan Barat.

8. Hari Bahasa Isyarat Internasional 2019



Gambar 1.12 Hari Bahasa Isyarat Internasional 2019

Sumber : Dokumentasi website GerkatIn

GerkatIn dan Pusbisindo atau Pusat Bahasa Isyarat Indonesia bekerja sama menyelenggarakan acara pawai sebagai rangkaian acara dalam memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional (HBII) dengan tema "Hak Bahasa Isyarat Untuk Semua". Tujuan yang diharapkan dalam acara ini, bayi tuli hingga lansia tuli dapat menikmati kehidupan dengan mengakses bahasa isyarat sehingga informasi dan komunikasi bagi masyarakat terpenuhi sejak lahir. GerkatIn dan Pusbisindo mengharapkan peran pemerintah memberikan dukungan pemenuhan hak atas informasi dan komunikasi bagi masyarakat tuli dan telah diwujudkan oleh kementerian Komunikasi dan Informatika dengan dukungan fasilitasi Bahasa Isyarat dalam setiap siaran berita televisi terutama TVRI. Peringatan HBII ini diselenggarakan pada 23 September di Area Car Free Day, GBK Senayan.

BAB IV

PARTISIPASI POLITIK WARGA DISABILITAS STUDI KASUS ORGANISASI GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNARUNGU INDONESIA DPD DKI JAKARTA PADA PEMILU 2019

A. Faktor Determinan yang Mempengaruhi Tingginya Partisipasi Politik Warga Disabilitas DKI Jakarta Dalam Pemilu 2019

Partisipasi politik merupakan suatu perwujudan perbuatan atas kehendak sendiri dalam suatu keegiatan politik. Sebagai warga negara yang bijak memiliki kesetaraan akan hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sejatinya, kewenangan berada di tangan masyarakat yang akan menentukan masa depan bangsa untuk kedepannya. Partisipasi politik dalam Pemilu 2019 dapat dimaknai dengan berbagai konteks yang dilakukan, seperti halnya : mengikuti kampanye, melakukan diskusi-diskusi politik, mengikuti perkembangan informasi sebagai suatu bentuk komunikasi politik, dan menggunakan hak suara atau hak pilih dalam Pemilu secara LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).

Hal tersebut demikian dilakukan oleh warga disabilitas DKI Jakarta yakni pengurus dan anggota organisasi Gerkatin DPD DKI Jakarta dalam pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif pada Pemilu 2019. Partisipasi politik yang dilakukan oleh organisasi Gerkatin DPD DKI Jakarta tidak hanya semata-mata menjadikan sebagai suatu wadah sesuai visi misi organisasi yang dijalankan untuk pencapaian kesejahteraan penyandang disabilitas (Tuna Rungu), namun organisasi Gerkatin DPD DKI Jakarta juga ikut merasakan secara langsung dalam perwujudan aksi partisipatif pada Pemilu 2019.

Tingkat partisipasi politik suatu kegiatan politik yang dilakukan dan dirasakan oleh warga negara dalam Pemilu pada suatu periode memiliki tingkat partisipasi yang berbeda-beda terkadang mengalami peningkatan maupun penurunan tingkat partisipasi tersebut. Peningkatan maupun penurunan terhadap suatu tingkat partisipasi politik berdasarkan dengan faktor determinan. Faktor determinan merupakan faktor penyebab yang mempengaruhi terhadap suatu hal yang dapat berdampak. Faktor determinan meningkatnya partisipasi politik warga disabilitas (Tuna Rungu) di DKI Jakarta dalam pemilu 2019 dimaknai sebagai suatu faktor penyebab atau pendukung yang mempengaruhi tingginya partisipasi politik warga disabilitas (Tuna Rungu) di DKI Jakarta dalam pemilu 2019. Faktor determinan dalam hal ini mempunyai pengaruh besar untuk membawa dampak secara berkelanjutan. Faktor determinan dapat dipengaruhi berdasarkan faktor karakteristik pribadi, karakteristik sosial, perangsang politik, dan pendidikan politik. Faktor determinan yang

dirasakan oleh warga disabilitas (Tuna Rungu) pengurus dan anggota organisasi Gerkatina DPD DKI Jakarta dalam Pemilu tahun 2019 akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Faktor Karakteristik Pribadi

Faktor karakteristik pribadi dimaknai sebagai suatu faktor yang berasal dari karakteristik dalam diri pribadi seorang pemilih berdasar atas rasa semangat dan rasa kepedulian yang tinggi untuk ikut serta atau berpartisipasi terhadap suatu kegiatan politik. Faktor karakteristik pribadi ini terbentuk atas keinginan yang besar dari dalam diri pribadi masing-masing tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain.

Partisipasi politik warga disabilitas (Tuna Rungu) organisasi Gerkatina DPD DKI Jakarta pada Pemilu 2019 berdasar atas faktor karakteristik, mereka cenderung merasakan dari motivasi dan semangat dalam diri dengan keinginan yang besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik pada Pemilu 2019. Mereka tetap memaknai bahwa berpartisipasi sebagai pemilih pada Pemilu 2019 merupakan suatu hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sepatutnya dilakukan walaupun adanya keterbatasan fisik bagi penyandang disabilitas, namun hal tersebut meyakinkan mereka bukan menjadi suatu penghalang atau penghambat demi terciptanya pemilu yang demokratis. Seperti yang disampaikan oleh Fedayen (45 tahun) selaku Humas Gerkatina DPD DKI Jakarta dalam wawancara berikut :

"Kami sangat peduli dan punya kemauan yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2019 demi kemajuan dan kemakmuran Negara Republik Indonesia." (Wawancara pada Fedayen Tanggal 30 November 2022).

Hal tersebut juga disampaikan oleh Hafid (25 tahun) selaku Wakil Ketua Bidang Kepemudaan DPP Gerkatina yang mengetahui dan merasakan secara langsung pada Pemilu 2019 dalam wawancara berikut :

"Saya dan teman-teman Tuli lainnya mempunyai semangat dan kemauan dalam diri untuk ikut dalam kegiatan pemilu 2019 lalu, Bidang kepemudaan maupun pengurus bidang lainnya di Gerkatina selalu memberikan motivasi dan semangat untuk tidak *insecure* karena keterbatasan yang dimiliki oleh teman-teman Tuli." (Wawancara pada Hafid Tanggal 27 November 2022).

Adapun seperti halnya yang disampaikan oleh anggota Gerkatina DPC Jakarta Pusat yang mengikuti kegiatan politik berpartisipasi pada Pemilu 2019 namun hal tersebut tidak hanya terbentuk atas semangat dan keinginan yang tinggi saja melainkan berdasarkan dengan adanya undangan inklusif disabilitas kepada penyandang disabilitas (Tuna Rungu) untuk dapat meningkatkan partisipasi politik warga disabilitas (Tuna Rungu) pada Pemilu 2019. Menurut pendapat Puput (42 tahun) dalam wawancara berikut :

"Ya, mau hadir jika ada undangan inklusif disabilitas."
(Wawancara pada Fedayen Tanggal 30 November 2022).

Partisipasi politik warga disabilitas (Tuna Rungu) organisasi Gerkatina DPD DKI Jakarta pada Pemilu 2019 berdasar atas faktor karakteristik menunjukkan bahwa mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik pada Pemilu 2019 ini asli dan nyata berdasarkan atas keinginan sendiri, menentukan hak suara pilihannya sesuai atas pilihan hati nurani pribadi para penyandang disabilitas. Namun berdasar atas pernyataan yang disampaikan oleh salah satu narasumber diatas, rasa semangat dan keinginan yang tinggi pun teriring dari motivasi yang diberikan untuk membebaskan diri penyandang disabilitas organisasi Gerkatina DPD DKI Jakarta dari adanya rasa *insecure* atau tidak percaya diri karena adanya keterbatasan fisik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas (Tuna Rungu).

Pemilih penyandang disabilitas (Tuna Rungu) di DKI Jakarta mendapatkan motivasi semangat yang lebih tinggi untuk lebih semangat dalam menjalani aktivitas maupun kegiatan sehari-hari dengan melalui adanya seminar motivasi berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Seminar tersebut tiap tahunnya diadakan oleh Gerkatina maupun organisasi penyandang disabilitas yang lainnya dengan harapan untuk meningkatkan komunikasi dengan baik antar sesama penyandang disabilitas, meningkatkan motivasi semangat dalam diri bahwa penyandang disabilitas pun memiliki kesetaraan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.



Gambar 1.13 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Isyarat dan Optimisasi Tuli
Sumber : Dokumentasi Instagram GERKATIN

Motivasi yang diberikan kepada seluruh penyandang disabilitas melalui acara-acara yang diselenggarakan tiap tahunnya terkhusus saat Hari Disabilitas Indonesia (HDI) yang dihadiri oleh Gerkatin, organisasi penyandang disabilitas lainnya, maupun untuk penyandang disabilitas (Tuna Rungu) secara umum. Pembinaan dan pengembangan bahasa isyarat Indonesia dalam konteks pencerdasan dan pengembangan optimisasi Tuli diselenggarakan di Jakarta pada September Tahun 2017.



Gambar 1.14 Dialog Nasional Pemuda
Sumber : Dokumentasi Instagram GERKATIN Bidang. Kepemudaan

Organisasi Gerkatin bidang kepemudaan dibawah naungan DPP Gerkatin dalam hal ini mengembangkan motivasi dan semangat penyandang disabilitas memiliki peran khusus menjadi wadah dalam menyuarakan aspirasi maupun motivasi yang terbentuk untuk menghalangi diri dari adanya rasa *insecure* atau rasa tidak percaya diri karena adanya keterbatasan fisik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas (Tuna Rungu) melalui dialog nasional pemuda dengan tema "Pemuda Indonesia Bangkit dan Bersatu". Peran yang dijalankan oleh organisasi Gerkatin menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan faktor karakteristik pribadi penyandang disabilitas (Tuna Rungu) dalam peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas (Tuna Rungu) pada Pemilu 2019.

Menurut pandangan peneliti, faktor karakteristik pribadi yang terbentuk dari semangat dan percaya diri yang dibangun oleh pribadi penyandang disabilitas mampu meningkatkan tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam proses pemilihan umum. Peningkatan partisipasi politik warga disabilitas khususnya pengurus dan anggota organisasi Gerkatina tidak akan tercapai tanpa didasari dengan adanya rasa semangat dalam diri dan paham akan kewajibannya sebagai warga negara yang memiliki kewajiban yang setara untuk memberikan hak suara dalam proses pemilihan umum dan menyuarkan haknya atas pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara.

2. Faktor Karakteristik Sosial

Faktor karakteristik sosial dimaknai sebagai suatu faktor yang berasal dari karakteristik dalam lingkup sosial yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi untuk ikut serta atau berpartisipasi terhadap suatu kegiatan politik. Faktor karakteristik sosial ini terbentuk atas pengaruh dari adanya kesamaan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan).

Faktor determinan partisipasi politik warga disabilitas (Tuna Rungu) organisasi Gerkatina DPD DKI Jakarta pada Pemilu 2019 berdasar atas faktor karakteristik sosial menunjukkan bahwa mereka berpartisipasi atau ikut serta dalam kegiatan politik pada Pemilu 2019 seperti : kampanye, diskusi politik, pemilihan suara pemilu tidak melalui adanya faktor pendorong dari lingkup sosial atas kesamaan SARA yang mempengaruhi penyandang disabilitas (Tuna Rungu) untuk ikut serta pada Pemilu 2019 melainkan dengan adanya pendekatan yang dilakukan oleh partai politik terhadap penyandang disabilitas maupun organisasi-organisasi penyandang disabilitas seperti salah satunya Gerkatina (Gerakan untuk kesejahteraan tuna rungu Indonesia) Seperti yang disampaikan oleh Fedayen (45tahun) selaku Humas Gerkatina DPD DKI Jakarta dalam wawancara berikut :

"Bukan karena kesamaan SARA tapi karena adanya pendekatan dari Partai Politik terhadap masyarakat Disabilitas DKI Jakarta.." (Wawancara pada Fedayen Tanggal 30 November 2022).



Gambar 1.15 Pidato Capres No.urut 02
Di acara peringatan Hari Disabilitas Internasional
Sumber : suara.com

Pendekatan yang dilakukan oleh salah satu calon presiden kandidat nomor urut.02 dengan partai pendukungnya dalam acara Hari Disabilitas Internasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat pada Desember tahun 2018. Acara ini mengundang seluruh organisasi-organisasi disabilitas di Indonesia diiringi dengan kegiatan memberikan buku versi Braille dengan judul "Paradoks Indonesia" dan menyuarakan pidatonya perihal hak-hak penyandang disabilitas.

Adapun seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu pengurus DPP Gerkatina bahwasanya pengurus maupun anggota Gerkatina memang ada yang mengikuti dalam kegiatan untuk pendekatan baik dari sisi partai politik pengusung suatu calon kandidat maupun calon kandidat namun hal tersebut perlu diperhatikan secara jelas dan teliti untuk menghindari dari adanya rasa sekedar ingin mengikuti saja atau terprovokasi tanpa melihat jelas elektabilitas kualitas dari masing-masing partai politik dan masing-masing calon kandidat pada Pemilu 2019. Menurut pendapat panjiman (45 tahun) dalam wawancara sebagai berikut :

"Seharusnya kegiatan pendekatan diadakan agar warga disabilitas tuli dapat pemahaman tersebut untuk hak-hak yang diinginkan dalam pemilu secara *point to point* sehingga warga disabilitas bisa paham sebagaimana pendapat yang ikut calon tersebut dan jangan hanya untuk mengikuti ajakan mendukung saja ." (Wawancara pada Fedayen Tanggal 30 November 2022).

Partisipasi politik warga disabilitas (Tuna Rungu) organisasi Gerkatina DPD DKI Jakarta pada Pemilu 2019 berdasarkan dari sisi pandangan faktor karakteristik sosial sangat digencarkan dalam pendekatan melalui suatu partai politik pengusung maupun calon kandidat eksekutif dan legislatif. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri dengan adanya acara-acara yang diselenggarakan oleh partai politik dengan mengundang organisasi-organisasi penyandang disabilitas dengan berusaha

mengambil peran dalam acara tersebut untuk menjadi wadah dalam mengambil simpati dan empati dengan menyuarakan aspirasi dalam bentuk pidato maupun aksi dalam suatu kegiatan untuk kepedulian terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Namun, dengan kegiatan yang diselenggarakan teriringi oleh niat baik terkadang dengan minimnya pemahaman oleh penyandang disabilitas terhadap Pemilu, suatu partai politik, dan elektabilitas calon kandidat yang akan membuat penyandang disabilitas khususnya sebagai pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya akan sekedar mengikuti aliran suatu golongan karena merasa dilibatkan pada suatu acara yang diselenggarakan.

Menurut pandangan peneliti, pendekatan yang digencarkan oleh partai politik maupun calon kandidat terpilih yang diusung oleh partai politik memiliki sisi positif dalam faktor karakteristik sosial sebagai pendukung terhadap peningkatan partisipasi politik khususnya untuk warga disabilitas pada Pemilu 2019. Sisi positif yang didapatkan oleh calon kandidat dan partai politik yang mengusungkan calon kandidat tersebut dengan melalui kegiatan peringatan hari disabilitas dapat menarik perhatian dan menarik simpati besar terhadap warga disabilitas. Konsep yang dibangun dalam memaparkan program kerja unggulan oleh calon kandidat terpilih beserta tim sukses maupun partai politik pengusungnya dapat menjadi taktik atau cara jitu dalam meningkatkan strategi pemenangan terhadap calon dan warga disabilitas ikut serta secara serentak dan menyemarakkan untuk memilih pilihan suara dan mengikuti proses pemilihan umum. Namun, sebagai warga negara yang bijak penyandang disabilitas dapat mengambil sisi positif untuk dapat memahami strategi yang dibangun oleh masing-masing calon kandidat sehingga warga disabilitas dapat selektif dan memilih sesuai hati nurani masing-masing.

3. Faktor Perangsang Politik

Faktor perangsang politik dimaknai sebagai suatu faktor yang terbentuk karena adanya pengaruh diskusi-diskusi politik dan informasi politik melalui media massa untuk menarik perhatian khusus dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu.

Media massa sebagai suatu wadah untuk perangsang politik dengan memberikan informasi terkini khususnya terkait perihal kegiatan politik seperti kampanye yang dilakukan oleh calon kandidat dalam tingkat eksekutif maupun legislatif dan didukung oleh kegiatan dari partai politik pengusung suatu calon kandidat tersebut. Namun, selain itu tidak hanya berkaitan perihal kegiatan politik atau kampanye oleh calon kandidat saja melainkan informasi yang dimuat dalam

media massa berupa informasi persiapan pemilu 2019, infografis terkait akses daftar pemilih tetap, dan saat pasca pemilu dilaksanakan seperti halnya perhitungan hasil perolehan suara pada pemilu yang kemudian informasi tersebut disebarluaskan melalui akses media massa. Bentuk media massa dalam memuat informasi berkaitan dengan pemilu dapat berupa akses berita yang dimuat dalam media cetak, media online, maupun media sosial.

Informasi mengenai persiapan pemilu maupun pasca pelaksanaan pemilu 2019 selanjutnya akan disebarluaskan atau dibagikan melalui whatsapp pengurus Gerkatin DPD DKI Jakarta oleh humas Gerkatin DPD DKI Jakarta dan selanjutnya akan dibagikan melalui whatsapp DPC Gerkatin yang tersebar di wilayah DKI Jakarta.



Gambar 1.16 Grup Whatsapp Gerkatin DPD DKI Jakarta
Sumber : dokumentasi humas Gerkatin DPD DKI Jakarta

Partisipasi politik warga disabilitas (Tuna Rungu) organisasi Gerkatin DPD DKI Jakarta khususnya dalam lingkup pengurus memiliki peran khusus dibalik adanya faktor perangsang politik melalui konteks akses media massa terhadap peningkatan Partisipasi politik warga disabilitas (Tuna Rungu) DKI Jakarta pada Pemilu 2019 yaitu dengan menyaring berita atau informasi yang dimuat dalam media sebelum dilakukannya *sharing* atau sebarluas melalui grup pengurus atau anggota organisasi Gerkatin. Seperti yang disampaikan oleh Fedayen (45 tahun) dalam wawancara berikut :

"Ya. Biasanya kalau ada informasi seputar pemilu dari medsos, kemudian akan disharing ke grup medsos grup tunarungu atau grup chatting tunarungu. Tapi kadangkala informasi mengandung hoax untuk menyerang calon lain"(Wawancara pada Fedayen Tanggal 30 November 2022).

Adapun seperti halnya yang disampaikan oleh anggota Gerkatina DPC Jakarta Pusat yang mengikuti kegiatan politik berpartisipasi pada Pemilu 2019 menyampaikan pendapat dengan adanya informasi yang disebarluaskan melalui media massa dan grup whatsapp pengurus maupun anggota Gerkatina DPD DKI Jakarta sangat penting dan berguna terkhususnya informasi yang disampaikan untuk penyandang disabilitas (Tuna Rungu). Menurut pendapat Puput (42 tahun) dalam wawancara berikut :

" Selalu ada informasi dan sangat penting bagi Tunarungu"(Wawancara pada Puput Tanggal 30 November 2022).

Faktor perangsang politik dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dapat melalui konteks diskusi-diskusi politik yang diselenggarakan oleh lembaga atau badan dibawah naungan pemerintahan yang berkaitan dalam mengurus pemilihan umum. Diskusi-diskusi politik yang diselenggarakan menurut mereka pengurus maupun anggota Gerkatina, diskusi tersebut turut mengundang organisasi-organisasi penyandang disabilitas dengan tujuan untuk memperkenalkan visi-misi calon partai politik maupun calon kandidat dan membahas mengenai program kerja yang akan dijalankan untuk kesejahteraan penyandang disabilitas. Seperti yang disampaikan oleh Fedayen (45 tahun) dalam wawancara berikut :

"Kami pernah mengikuti acara diskusi tentang visi dan misi parpol2, acara tsb diselenggarakan oleh KPU di Pusat KPU. Diskusi yang membahas program2 untuk disabilitas yang akan datang." (Wawancara pada Fedayen Tanggal 30 November 2022).

Seperti halnya yang disampaikan oleh anggota Gerkatina DPC Jakarta Pusat yang mengikuti kegiatan politik berpartisipasi pada Pemilu 2019 menyampaikan pendapat bahwa diskusi tentang politik dalam persiapan pemilu kerap dilaksanakan dan diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang membawahi terkait penyelenggaraan pemilu dengan mengundang penyandang disabilitas dalam lingkup pengurus dan anggota organisasi penyandang disabilitas. Seperti yang disampaikan dalam pendapat Puput (42 tahun) dalam wawancara berikut :

"Ya, saya pernah mengikuti acara diskusi tersebut di KPU, Menteng." (Wawancara pada Puput Tanggal 30 November 2022).

Peningkatan partisipasi politik warga disabilitas (Tuna Rungu) DKI Jakarta pada pemilu 2019 dalam faktor perangsang politik. Organisasi Gerkatina memberikan pengaruh secara berkelanjutan dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kesigapan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas (Tuna Rungu) melalui media sosial seperti grup whatsapp pengurus dan anggota Gerkatina. Selain itu kesigapan dalam menyaring segala bentuk informasi yang sekiranya mengandung unsur hoax dalam berita informasi yang disampaikan. Hal tersebut tentunya akan mempermudah dan membantu bagi penyandang disabilitas untuk dapat memahami dan mengikuti alur informasi dengan bijak dan baik. Selain hal tersebut, bagi penyandang disabilitas yang masih mengalami kesulitan akan memahami informasi maupun kesulitan dalam mengakses media untuk mendapatkan informasi dapat terpecahkan dengan adanya diskusi-diskusi politik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang menaungi terkait penyelenggaraan pemilu seperti halnya KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Menurut pandangan peneliti, perangsang politik dengan melalui penyebaran informasi perihal persiapan pemilu seperti : calon kandidat beserta program kerja unggulan dan visi misinya, partai politik yang terdaftar sebagai partai yang terverifikasi ikut serta dalam mendapatkan kursi legislatif pada pemilu, mekanisme pemberian hak suara di TPS untuk pemilih warga disabilitas melalui grup whatsapp merupakan suatu hal yang berdampak baik terhadap peningkatan partisipasi politik khususnya terhadap warga disabilitas di DKI Jakarta pada Pemilu 2019. Perangsang politik melalui diskusi diskusi politik yang dituju dengan kolaborasi bersama organisasi penyandang disabilitas merupakan salah satu cara jitu dalam meningkatkan hubungan baik antar pihak dan meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas

4. Faktor Pendidikan Politik

Faktor pendidikan politik sebagai salah satu faktor determinan yang terbentuk karena adanya bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dijalankan untuk persiapan dalam pemilu. Faktor pendidikan politik yang dijalankan dapat menunjang peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu yang diselenggarakan. Besarnya ketertarikan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih

yang diselenggarakan oleh badan atau lembaga dibawah naungan pemerintah untuk bertanggungjawab dalam persoalan pemilu, maka akan semakin tinggi pola pemahaman dan tingkat partisipasi politik pemilih pada pemilu.

Kesadaran terhadap motivasi dan semangat yang tertanam dari dalam diri saja tidak cukup untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pada pemilu terkhusus bagi penyandang disabilitas (Tuna Rungu). Kontestasi dalam suatu pemilu antar calon kandidat satu sama lain semakin mendekati pelaksanaan pemilu maka persaingan akan semakin kuat. Oleh sebab itu, sosialisasi dan pendidikan pemilih perlu dilaksanakan untuk seluruh kalangan masyarakat Indonesia dengan harapan supaya masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan terkhusus bagi penyandang disabilitas (Tuna Rungu) yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat memahami visi misi maupun program kerja partai politik dan calon kandidat dengan bijak. Selain itu, sosialisasi yang diberikan dapat berupa simulasi perihal cara memberikan hak suara pada saat di TPS terkhusus bagi penyandang disabilitas dan mekanisme pendampingan bagi penyandang disabilitas saat di TPS. Seperti yang disampaikan oleh Humas Gerkatina DPD DKI Jakarta, menurut pendapat Fedayen (45 tahun) dalam wawancara berikut:

"Lembaga Pemerintah (KPU). Pernah mengadakan sosialisasi dan pendidikan Pemilu bagi Penyandang disabilitas" dan yang antusias untuk ikut dalam kegiatan tersebut. (Wawancara pada Fedayen Tanggal 30 November 2022).



Gambar 1.17 Sosialisasi Pemilu untuk disabilitas

Sumber : kompas.com

Faktor pendidikan politik sebagai faktor determinan terhadap peningkatan partisipasi politik dapat terlaksana dengan baik dan antusias organisasi penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas di DKI Jakarta secara umum sangat antusias untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU selaku lembaga dibawah naungan pemerintah yang bertanggung jawab atas diselenggarakannya Pemilu. Sosialisasi pemilu untuk disabilitas diselenggarakan di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat pada 14, Februari 2019.

Menurut pandangan peneliti, melalui sosialisasi pemilu untuk disabilitas merupakan konsep yang relevan dan sesuai dengan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas. Sebab, tidak semua penyandang disabilitas dapat dengan mudah mengakses informasi terkait mekanisme pemungutan suara saat proses pemilihan umum. Keterbatasan pengetahuan dan daya tangkap yang melemah terkadang menjadi faktor penghambat tingkat partisipasi pemilih warga disabilitas. Salah satu cara efektif untuk meminimalisir segala faktor penghambat tersebut yakni dengan sosialisasi yang mengundang seluruh penyandang disabilitas, pengurus organisasi penyandang disabilitas untuk dapat mempraktikkan serta memahami secara langsung dengan paduan panitia KPPS terkait cara pencoblosan, jenis-jenis surat suara, penilaian sah dan tidak sah, cara memasuki bilik suara serta, perhitungan suara, pendampingan saat proses pemilihan umum khususnya terhadap warga penyandang disabilitas.

Faktor determinan dianalisis dalam berbagai faktor seperti: karakteristik pribadi, karakteristik sosial, perangsang politik, dan pendidikan politik sangat menjadi penentu dalam peningkatan tingkat partisipasi politik terutama bagi penyandang disabilitas (Tuna Rungu) Karakteristik pribadi menjadi awal dari suatu faktor determinan dalam peningkatan partisipasi politik warga disabilitas di DKI Jakarta. Kemudian, karakteristik sosial juga dapat mempengaruhi adanya peningkatan pada tingkat partisipasi politik karena adanya pendekatan politik dari suatu calon kandidat maupun partai politik tentunya pendekatan yang didasari dengan rasa empati dan simpati maupun kegiatan sebagai suatu bentuk kepedulian dapat membuat masyarakat tergerak hatinya untuk ikut berpartisipasi pada pemilu 2019. Perangsang politik yang dimainkan dengan peran organisasi dalam bentuk media informasi melalui media massa dan diskusi-diskusi politik oleh suatu lembaga atau badan pemerintahan terkait pemilu akan meningkatkan partisipasi pemilih. Antusias yang tinggi dalam sosialisasi pun menjadi keberhasilan pendidikan politik.

BAB V

PERAN POLITIK ORGANISASI GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNARUNGU INDONESIA DPD DKI JAKARTA PADA PEMILU 2019

A. Peran Politik Organisasi GerkatIn Dalam Mendampingi Warga Disabilitas DKI Jakarta Pada Pemilu 2019

Peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak dengan membawa dampak atau pengaruh baik secara langsung terhadap aspek kehidupan. Peran politik organisasi dalam hal ini memiliki peran penting dan membawa dampak perubahan dalam suatu kepentingan politik. Organisasi menjadi wadah dan orang yang memiliki kedudukan dalam kepengurusan suatu organisasi menjadi aktor terhadap suatu perwujudan tindakan dengan membawa pengaruh baik dan dirasakan secara langsung oleh khalayak umum. GerkatIn sebagai organisasi kesejahteraan penyandang disabilitas tunarungu yang memainkan peran langsung dibalik faktor determinan peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas tunarungu pada Pemilu 2019 di DKI Jakarta. Peningkatan hal tersebut tidak hanya terwujud dengan adanya suatu wadah yaitu organisasi atau komunitas yang menjunjung tinggi kesejahteraan sebagai visi misi dan tujuan pedoman dalam suatu organisasi maupun komunitas.

Peningkatan partisipasi politik pemilih bagi penyandang disabilitas tunarungu dalam Pemilu 2019 di DKI Jakarta terwujud dari adanya aktor atau pelaku yang muncul dan terlibat dalam meningkatkan kualitas dan bukan hanya sekedar kuantitas terkait jumlah banyaknya yang mengikuti atau berpartisipasi dalam Pemilu 2019 di DKI Jakarta. Hal ini berkaitan dengan program kerja yang dijalankan sesuai dengan visi misi dan tujuan pencapaian yang diharapkan dan diberikan secara langsung kepada target atau sasaran secara tepat yakni penyandang disabilitas tunarungu atau tuli. Peran politik organisasi GerkatIn yang diwujudkan dalam program kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Hari Bahasa Isyarat Internasional

Program kegiatan Hari Bahasa Isyarat Internasional (HBII) merupakan kegiatan yang diselenggarakan tiap tahunnya. Organisasi GerkatIn dan Pusbisindo atau Pusat Bahasa Isyarat Indonesia sebagai aktor yang berperan dalam penyelenggaraan program kegiatan tersebut. Program kegiatan ini dimasifkan dengan tujuan untuk menyuarakkan hak dalam mengakses bahasa isyarat dan semangat dalam berbahasa isyarat sehingga informasi dan komunikasi bagi masyarakat terpenuhi sejak lahir. GerkatIn dan Pusbisindo mengambil peran bersama dengan penyandang disabilitas tunarungu mengharapkan peran pemerintah memberikan dukungan pemenuhan hak atas informasi dan komunikasi bagi masyarakat tuli dan

telah diwujudkan oleh kementerian Komunikasi dan Informatika dengan dukungan fasilitasi Bahasa Isyarat dalam setiap siaran berita televisi.

Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional ini bukan hanya sekedar dalam hal peringatan tiap tahunnya saja namun peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional ini didasari atas rasa semangat yang digerakkan dalam diri penyandang disabilitas untuk dapat menjalankan kehidupan setara tanpa adanya perbedaan dan dapat menjalankan hak dan kewajiban yang setara dengan masyarakat umum sebagai warga negara Indonesia. Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional ini ditujukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM.

Expectation atau harapan yang ditunjukkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Gerkatin dan Pusbisindo yakni badan atau lembaga yang berada di naungan pemerintahan dapat memberikan dukungan sepenuhnya dalam pemenuhan hak atas informasi dan komunikasi bagi masyarakat tuli atau tunarungu. Pemenuhan hak atas informasi dalam hal ini memiliki keterkaitan dalam persiapan pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan Umum pada tahun 2019. Informasi yang disampaikan secara jelas dan nyata serta diimbangi dengan adanya peraga Juru Bahasa Isyarat dalam menampilkan informasi tentu akan meningkatkan semangat yang terbentuk terhadap karakteristik diri membantu percepatan peningkatan kualitas serta kuantitas partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas tunarungu pada Pemilu 2019.

Norm atau norma normatif yang ditunjukkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Gerkatin dan Pusbisindo mengacu pada ketentuan aturan landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman organisasi Gerkatin maupun organisasi penyandang disabilitas lainnya yang dimuat dalam peraturan hukum diantaranya :

- Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor Register AHU-166.AH.01.06 Tahun 2010 tertanggal 20 Desember 2010
- Undang-Undang No.19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Performance atau perwujudan perilaku dalam peran yang dilakukan oleh aktor dalam hal ini organisasi Gerkatin dan Pusbisindo yakni dengan melakukan pawai dan *training of trainer* pada peringatan Hari Bahasa Isyarat Indonesia atau HBII. *Evaluation* atau penilaian dari perwujudan kegiatan yang dilakukan oleh Gerkatin dan penyandang disabilitas tunarungu lainnya yang menjadi peserta dalam kegiatan tersebut mendapatkan penilaian atau tanggapan positif dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, stasiun televisi TVRI, dan Kubu Raya.

2. Pelatihan bersama Federasi Dunia Tuli dan Seminar Advokasi

Program kegiatan merupakan kegiatan Pelatihan bersama Federasi Dunia Tuli dan Seminar Advokasi. Gerkatin bersama Federasi Tuli Dunia (World Federation of The Deaf) dan Pusbisindo dan didukung oleh Nippon Foundation. Kegiatan ini merupakan pelatihan dalam memahami UU No.8 Tahun 2016 dan CRPD. Pelatihan ini diakhiri dengan seminar advokasi dengan tema "Peluang dan Tantangan bagi Negara untuk Meresmikan Bahasa Isyarat Indonesia". Pelatihan ini dihadiri oleh 14 peserta melalui seleksi dari lintas daerah dengan ketentuan umur 18-40 tahun dan mampu berbahasa isyarat internasional dan Bisindo yang baik.

Aktor dalam kegiatan ini yakni Gerkatin ter khususnya mengambil peran dalam memberikan suatu bentuk pendidikan untuk penyandang disabilitas tunarungu dalam mengimplementasikan landasan hukum atau peraturan yang menjadi acuan dalam lingkup aspek kehidupan penyandang disabilitas tunarungu. *Expectation* atau harapan yang ditunjukkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Gerkatin dalam hal ini yakni penyandang disabilitas tunarungu atau tuli dapat menjadi bekal dalam memahami cara advokasi yang baik dan efektif terhadap pemerintah. Dengan diselenggarakannya pelatihan ini diharapkan juga dapat memahami dengan baik kiat-kiat advokasi melalui CRPD dan Undang-Undang.

Norm atau norma normatif yang ditujukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Gerkatin dan Pusbisindo mengacu pada ketentuan aturan landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman organisasi Gerkatin maupun organisasi penyandang disabilitas lainnya yang dimuat dalam peraturan hukum diantaranya :

- Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- CRPD atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD ini merupakan perjanjian multilateral konvensi yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Performance atau perwujudan perilaku dalam peran yang dilakukan oleh aktor dalam hal ini organisasi Gerkatin memberikan pelatihan dan seminar advokasi yang dimentori oleh perwakilan WFD, Tenaga ahli kantor staff presiden, ketua LRBI UI, Ketua Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, PMPK Kemendikbud, Kementrian Sosial, Staff khusus presiden, dan Komisi Nasional Disabilitas dengan tema "Peluang dan Tantangan bagi Negara untuk Bahasa Isyarat Indonesia". *Evaluation* atau penilaian dari perwujudan kegiatan yang dilakukan oleh Gerkatin dan penyandang disabilitas tunarungu lainnya yang menjadi peserta dalam kegiatan tersebut ditanggapi dengan

baik oleh pemerintah yakni dengan menunjukkan hasil penelitian kepada para pemangku kebijakan pemerintah pada seminar 9 Juni 2022.

3. Pelatihan Soft Skill untuk SDM Tuli

Program kegiatan ini merupakan kegiatan Gerkatin menyelenggarakan pelatihan soft skill berkolaborasi dengan PUSBISINDO untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Cakupan pembahasan dalam kegiatan pelatihan soft skill untuk SDM Tuli diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemerolehan Bahasa
- b. Pengajaran Bahasa Isyarat terhadap dewasa dan anak-anak
- c. Kode Etik
- d. Perbedaan cara ajar dewasa dan anak-anak

Expectation atau harapan yang ditunjukkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Gerkatin dalam hal ini yakni penyandang disabilitas tunarungu atau tuli dapat menjadi bekal dalam memahami ruang lingkup bahasa isyarat dengan baik. *Norm* atau norma normatif yang ditujukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Gerkatin dan Pusbisindo mengacu pada ketentuan aturan landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman organisasi Gerkatin maupun organisasi penyandang disabilitas lainnya yang dimuat dalam peraturan hukum diantaranya :

- Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Hak Bahasa Isyarat

Performance atau perwujudan perilaku dalam peran yang dilakukan oleh aktor dalam hal ini organisasi Gerkatin memberikan pelatihan soft skill dalam bentuk skill pengoperasian diantaranya Google Classroom, Zoom, Google Form, Ms. Power Point, Ms. Excel untuk menunjang pengoperasian sistem computer maupun pengajaran secara daring atau online. Pelatihan soft skill ini diikuti oleh 36 orang peserta disabilitas tunarungu atau tuli pada 1 November-18 Desember 2022 di Zoom meet. *Evaluation* atau penilaian dari perwujudan kegiatan yang dilakukan oleh Gerkatin dan penyandang disabilitas tunarungu lainnya yang menjadi peserta dalam kegiatan tersebut yakni mendapatkan pembekalan dan pemahaman lebih dalam mengoperasikan sistem teknologi secara online. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik dalam menunjang percepatan peningkatan teknologi terhadap penyandang disabilitas tentunya akan mengalami kemajuan dalam memahami informasi yang dihadirkan melalui media digital. Informasi yang dapat dipahami ini tentunya akan

semakin mudah terserap dengan baik oleh penyandang disabilitas tunarungu dan dapat diaplikasikan terhadap sesama penyandang disabilitas satu sama lain. Hal ini tentu akan meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu 2019.

4. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Tuli

Program kegiatan ini merupakan pelatihan pemberdayaan perempuan tuli atau tunarungu yang diselenggarakan oleh Organisasi Gerkatina dengan tema "Harkat dan Martabat Perempuan Disabilitas Rungu/Tuli" bersama 20 orang perempuan disabilitas rungu/tuli Se-Jabodetabek dengan narasumber diantaranya : Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan *Disability Rights Fund (DRF)* pada 29-30 Juli 2022 di Hotel 88, Jakarta Barat. Pelatihan ini disampaikannya materi tentang :

- a. Kekerasan, Diskriminasi Perempuan Disabilitas Rungu/Tuli
- b. Prinsip Dasar Pertolongan Pertama Psikologi
- c. Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Berbasis Gender, PSEAH Umum
- d. PSEAH khusus Gerkatina

Expectation atau harapan yang ditunjukkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Gerkatina dalam hal ini yakni pelatihan pemberdayaan yang dikhususkan untuk perempuan Tuli atau Tunarungu sebagai representatif dari adanya pemenuhan hak perempuan dan hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tunarungu. Harapan dari adanya pelatihan ini yakni keadilan gender dapat ditegakkan sesuai dengan adanya landasan hukum yang menjadi pedoman terhadap kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan, kekerasan maupun diskriminasi terhadap perempuan disabilitas tunarungu atau tuli tidak menjadi persoalan yang marak terjadi dan tidak mengalami peningkatan kasus berkaitan dengan kekerasan dan diskriminasi perempuan disabilitas tunarungu, dan harapan selanjutnya ditujukan kepada penyandang disabilitas tunarungu dapat memahami secara jelas dan baik terkait prinsip pertolongan psikologi terhadap korban terkhusus penyandang disabilitas tunarungu.

Norm atau norma normatif yang ditujukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Gerkatina mengacu pada ketentuan aturan landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman organisasi Gerkatina dan perempuan maupun organisasi penyandang disabilitas lainnya yang dimuat dalam peraturan hukum diantaranya :

- Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

- Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Performance atau perwujudan perilaku dalam peran yang dilakukan oleh aktor dalam hal ini organisasi Gerkatin memberikan pelatihan pemberdayaan perempuan tuli atau tunarungu dengan materi pembahasan yang diberikan oleh narasumber dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan *Disability Rights Fund (DRF)* kepada peserta penyandang disabilitas tunarungu yang telah terseleksi. *Evaluation* atau penilaian dari perwujudan kegiatan yang dilakukan oleh Gerkatin dan penyandang disabilitas tunarungu lainnya yang menjadi peserta dalam kegiatan tersebut yakni peserta mendapatkan pembekalan dalam mengatasi persoalan yang berkaitan dengan kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan gender dan dapat menilai dari landasan hukum yang menjadi pedoman dalam persoalan tersebut maupun program kerja yang nantinya dijanjikan oleh para calon kandidat eksekutif atau anggota legislatif sudah dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak dan tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah dalam mengimplementasikan melalui suatu program kerja yang dirancang dan menegakkan peraturan yang berkaitan dengan persoalan tersebut .

5. Webinar Kesehatan Mental

Program kegiatan ini merupakan webinar kesehatan mental untuk tuli yang diselenggarakan oleh organisasi Gerkatin berkolaborasi dengan didorong dengan adanya faktor dari data yang terlampir pada awal tahun 2021 terdapat kasus 10 orang tuli meninggal dunia, 3 kasus orang tuli bunuh diri dengan gantung diri, 2 orang tuli meninggal dunia karena COVID-19 dan yang lain karena sakit. Webinar kesehatan mental diselenggarakan dengan bantuan DRF (*Disability Rights Fund*). Sub tema dalam webinar ini diantaranya :

- a. Hari pertama, sub tema "Pengantar tentang kesehatan mental untuk tuli"
- b. Hari kedua, sub tema "Bagaimana kita menghadapi kesehatan mental kita ?"
- c. Hari ketiga, sub tema "Stress dan cara penanganannya"
- d. Hari keempat, sub tema "Bagaimana cara merawat diri"

Expectation atau harapan yang ditunjukkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Gerkatin dalam hal ini yakni penyandang disabilitas tunarungu mengharapkan pemerintah dapat lebih peka terhadap hal yang menjadi hak yang didapatkan penyandang disabilitas tunarungu dalam mengatasi berbagai persoalan terkait kesehatan mental penyandang disabilitas tunarungu yakni dengan adanya wadah dalam menaungi persoalan tersebut seperti halnya pendirian tempat konsultasi untuk tuli dengan ketentuan bisa berisyarat dan ada juru bahasa isyarat. *Norm* atau norma normatif yang ditujukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Gerkatin mengacu pada ketentuan aturan landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman organisasi Gerkatin dan perempuan maupun organisasi penyandang disabilitas lainnya yang dimuat dalam peraturan hukum diantaranya :

- Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Performance atau perwujudan perilaku dalam peran yang dilakukan oleh aktor dalam hal ini organisasi Gerkatin memberikan webinar kesehatan mental dengan tema "Cintailah Dirimu" dan dihadiri oleh 90 orang peserta pada Februari 2021. . *Evaluation* atau penilaian dari perwujudan kegiatan yang dilakukan oleh Gerkatin dan penyandang disabilitas tunarungu lainnya yang menjadi peserta dalam kegiatan tersebut yakni peserta penyandang disabilitas tunarungu yang sangat antusias dengan materi yang disampaikan dapat membawa feedback dan penyandang disabilitas tunarungu dapat memahami lebih dalam terkait kesehatan mental bagi penyandang disabilitas tunarungu dan menjadi penilaian bagi penyandang disabilitas tunarungu terkait penyesuaian landasan hukum dengan implementasi dalam lingkup aspek kehidupan penyandang disabilitas tunarungu karena hal tersebut termasuk hak pemenuhan disabilitas tunarungu sebagai warga negara.

6. Volunteer Pendampingan Disabilitas

Program kegiatan ini merupakan program yang dijalankan oleh Gerkatin dengan kolaborasi bersama Bawaslu dan KPU. Kegiatan pendampingan ini sebagai bentuk suatu kepekaan pemerintah sebab mengetahui dan memahami bahwa penyandang disabilitas ketika proses pemilihan suara pada saat Pemilu membutuhkan peran seseorang panitia KPPS untuk dapat membantu maupun menemani ketika proses pemilihan suara pada saat Pemilu. Volunteer ini dibuka dengan mekanisme seleksi oleh pihak KPU maupun Bawaslu. Proses atau mekanisme seleksi untuk volunteer pendampingan disabilitas terhadap penyandang disabilitas dikhususkan untuk pengurus atau anggota organisasi penyandang disabilitas maupun penyandang

disabilitas lainnya dengan ketentuan bersyarat dapat berbahasa isyarat dengan baik sehingga dapat membantu kesulitan dengan kemungkinan terjadi pada saat proses pemilihan suara di TPS Pemilu.

Petugas panitia pendamping disabilitas pada pemilu menjadi salah satu alternatif penting jika terdapat pemilih penyandang disabilitas terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT namun di sisi lain pihak keluarga dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik seperti halnya penyandang disabilitas tidak bisa menemani dalam proses pemilihan suara di TPS pada pemilu. Panitia pendamping disabilitas pada pemilu umumnya secara mayoritas dilakukan terhadap penyandang disabilitas seperti Tunanetra, dan cacat fisik seperti tidak mempunyai kedua tangan. Pandangan lain secara realitanya penyandang disabilitas seperti Tunarungu memiliki permasalahan pada saat pemanggilan antrian ketika diarahkan untuk melakukan pencoblosan atau pemilihan suara di bilik suara. Hal tersebut demikian menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam bertanggungjawab akan pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan oleh penyandang disabilitas.

Organisasi Gerkatina sebagai organisasi yang meanaungi dan mempunyai visi misi serta tujuan dalam menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Indonesia khususnya terhadap penyandang disabilitas Tunarungu, dalam hal tersebut mengambil peran atas keresahan yang dialami secara langsung oleh penyandang disabilitas tunarungu seperti yang dilakukan oleh perwakilan pengurus dan anggota organisasi Gerkatina DPD DKI Jakarta yakni Pak Ary dan Pak Muhali.

Expectation atau harapan yang ditunjukkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Gerkatina dalam hal ini yakni pengurus dan anggota Gerkatina sebagai perwakilan volunteer untuk mengikuti rekrutmen panitia pendamping disabilitas pada Pemilu 2019. Harapan yang dibangun tentunya atas keresahan yang timbul dan pernah terajadi pada tahun atau periode sebelumnya saat dilaksanakan pesta demokrasi Pemilu. Keresahan atau permasalahan yang timbul pada periode yang lampau tentunya akan menjadi refleksi untuk perubahan lebih baik kedepannya. Mekanisme perubahan tersebut yang nantinya diharapkan menjadi sesuatu yang berdampak positif untuk kesejahteraan dan keadilan terkhususnya terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kapasitas sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang setara sebagai warga negara pada umumnya. Pemenuhan hak dan kewajiban merupakan sesuatu hal yang berjalan beriringan. Pemenuhan hak penyandang disabilitas berkaitan dengan norma normatif

dan landasan hukum yang digunakan dalam kehidupan penyandang disabilitas sedangkan kewajiban tentunya berkaitan dengan perwujudan perilaku penyandang disabilitas pada konteks tersebut.

Norm atau norma normatif yang ditunjukkan dalam program atau peran yang dilakukan oleh organisasi Gerkatin mengacu pada ketentuan aturan landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman organisasi Gerkatin dan penyandang disabilitas lainnya yang dimuat dalam peraturan hukum diantaranya :

- Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- PP Nomor 39 Tahun 2020 Tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan

Performance atau perwujudan perilaku dalam peran yang dilakukan oleh aktor dalam hal ini organisasi Gerkatin memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas secara umum di lingkup DKI Jakarta. Selain hal tersebut, kewajiban yang dijalankan sebagai perwujudan perilaku atau peran yang dijalankan oleh penyandang disabilitas yakni mengikuti proses pemilihan umum atau pemilu dengan memberikan hak suara setara dengan kewajiban umumnya sebagai warga negara.

Evaluation atau penilaian dari perwujudan kegiatan yang dilakukan oleh Gerkatin dan penyandang disabilitas tunarungu lainnya yakni rekrutmen volunteer untuk panitia pendamping disabilitas sudah tersampaikan secara menyeluruh walaupun hanya sebagian penyandang disabilitas saja yang lolos seleksi tersebut dan sebagian lainnya ketertarikan untuk mengikuti volunteer sebagai panitia pendamping penyandang disabilitas masih belum menyeluruh. Dengan demikian untuk menjadi refleksi perubahan lebih baik untuk persiapan dalam proses pemilihan umum periode kedepannya, pemerintah melalui lembaga atau badan yang menaungi dalam proses pemilihan umum lebih menyemarakkan atau meningkatkan pembukaan rekrutmen panitia pendamping pemilih penyandang disabilitas dengan lebih menarik perhatian penyandang disabilitas seperti dengan benefit atau keuntungan yang akan didapatkan atas partisipasinya suatu pengurus maupun anggota organisasi penyandang disabilitas sehingga program kerjasama atau kolaborasi dapat terjalin dengan baik antar pihak baik dari pihak pemerintah maupun pihak organisasi penyandang disabilitas.

No.	DPC GERKATIN	JUMLAH
1.	Jakarta Barat	274 orang
2.	Jakarta Timur	135 orang
3.	Jakarta Pusat	199 orang
4.	Jakarta Utara	226 orang
5.	Jakarta Selatan	150 orang

Tabel 1.2 Jumlah Pemilih Disabilitas Tunarungu DPD Gerkatina DKI Jakarta Pada Pemilu 2019.

Sumber : Rekapitulasi data Humas DPP Gerkatina

Data yang tercantum dalam paparan diatas merupakan data pemilih penyandang disabilitas khususnya pengurus dan anggota Gerkatina di wilayah DPD DKI Jakarta yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk mengikuti proses pemilihan umum pada Pemilu tahun 2019 di DKI Jakarta. Data pemilih penyandang disabilitas tersebut terbilang jumlah penyandang disabilitas yang menyeluruh dan cukup banyak. Jumlah untuk pengurus dan anggota organisasi Gerkatina yang terakumulasi menyeluruh di seluruh Indonesia sebesar 18.000.000 lebih berkontribusi terhadap organisasi Gerkatina.

Data tersebut yang dicantumkan dalam tabel dibenarkan oleh Fedayen selaku Humas DPP Gerkatina dan Humas Gerkatina DPD DKI Jakarta. Data tersebut dipaparkan sesuai dengan akumulasi data yang tersimpan dan menjadi arsip organisasi Gerkatina baik tingkat pusat DPP Gerkatina maupun tingkat regional yakni Gerkatina DPD DKI Jakarta. Regional pengurus Gerkatina DPD DKI Jakarta merupakan salah satu regional pengurus dengan jumlah anggota dan pengurus yang terbilang cukup lebih banyak. Program kegiatan yang dijalankan oleh DPP Gerkatina maupun Gerkatina DPD DKI Jakarta cukup menarik perhatian dari berbagai sisi dan tidak hanya menarik perhatian satu sisi saja yakni bagi penyandang disabilitas yang tersebar menyeluruh di seluruh Indonesia.

Program kegiatan dengan banyaknya harapan yang terbagun dan perwujudan program kegiatan yang dijalankan sesuai dengan norma normatif berupa konsep landasan hukum yang menjadi pedoman terhadap program kegiatan yang diselenggarakan sudah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan atas dasar pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas. Pemenuhan hak yang diinginkan tidak menjadi suatu perbedaan melainkan kesetaraan yang diharapkan oleh

penyandang diabilitas sebagai warga negara. Program kegiatan yang telah diwujudkan bersama melalui *performance* penyandang disabilitas menjadi evaluasi penilaian untuk pemerintah dan menunjang penilaian tingkat partisipasi politik warga disabilitas sebagai pemilih tetap dalam pemilihan umum 2019. Program kegiatan sebagai peran yang dijalankan oleh aktor atau dalam konteks tersebut yakni organisasi Gerkatin dapat menjadi penentu keberhasilan peningkatan partisipasi politik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Partisipasi politik pemilih disabilitas tunarungu organisasi Gerkatin DPD DKI Jakarta sudah mengalami peningkatan dalam ikut berpartisipasi pada Pemilu 2019 di DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah pemilih yang berasal dari pengurus maupun anggota Gerkatin DPD DKI Jakarta mendapati jumlah data atau kuantitas data yang tinggi. Faktor determinan sebagai pendorong dari adanya peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas tunarungu dalam Pemilu 2019 sangat mempengaruhi terhadap tingkat partisipasi tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya faktor karakteristik diri dimaknai dengan merasakan dari motivasi dan semangat dalam diri dengan keinginan yang besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik pada Pemilu 2019 memaknai bahwa berpartisipasi sebagai pemilih pada Pemilu 2019 merupakan suatu hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sepatutnya dilakukan.

Faktor karakteristik sosial Partisipasi politik warga disabilitas (Tuna Rungu) organisasi Gerkatin DPD DKI Jakarta pada Pemilu 2019 sangat digencarkan dalam pendekatan melalui suatu partai politik pengusung maupun calon kandidat eksekutif dan legislatif. Faktor perangsang politik yang dibuktikan dengan peran media digital sebagai jembatan penghubung informasi kepada penyandang disabilitas tunarungu dan faktor pendidikan politik Faktor pendidikan politik dapat terlaksana dengan baik dan antusias organisasi penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas di DKI Jakarta secara umum sangat antusias untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU. Namun di sisi lain, masih terdapat penyandang disabilitas lainnya yang merasakan adanya kekurangan dalam menangkap atau memahami informasi karena adanya keterbatasan yang dimilikinya dan di sisi lain dibalik peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas yakni program kegiatan internal yang diselenggarakan secara langsung baik dari pihak pemerintah maupun organisasi penyandang disabilitas masih minim dan tidak dilakukan secara rutin sehingga

saat pelaksanaan proses pemilihan suara langsung butuh pendampingan khusus terhadap penyandang disabilitas untuk membantu atau memudahkan pelaksanaan proses pemilihan umum.

- b. Peran DPP Gerkatina dan DPD Gerkatina DKI Jakarta telah mengambil peran secara baik dan memaksimalkan peran tersebut sesuai dengan visi misi dan tujuan organisasi untuk ditujukan sebagai kesejahteraan penyandang disabilitas tunarungu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya program kerja yang dijalankan sudah tepat sasaran dan mendapatkan output yang diharapkan dari adanya program kegiatan tersebut. Program kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi Gerkatina sudah membawa pengaruh nyata dalam memaksimalkan hak-hak pemenuhan penyandang disabilitas tunarungu khususnya dan menjadi perhatian bagi pemerintah. Kegiatan yang dijalankan didasari dengan adanya harapan yang ingin diwujudkan dan dibawa kedalam suatu bentuk *performance* atau perilaku yang diambil dalam peran Gerkatina. Program kegiatan tersebut diantaranya Hari Bahasa Isyarat Internasional, Pelatihan bersama Federasi Dunia Tuli dan Seminar Advokasi, Pelatihan Soft Skill untuk Tuli, Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Tuli, dan Webinar Kesehatan Mental.
- c. Ekspektasi atau harapan dari penyandang disabilitas tunarungu beserta organisasi Gerkatina maupun organisasi penyandang disabilitas telah menunjukkan adanya peningkatan dalam realisasi peran Gerkatina yang dijalankan dan dalam program kegiatan yang telah dijalankan telah menghasilkan output yang terwujud seperti adanya dukungan dari Kementerian informasi dan komunikasi dan lembaga atau badan dibawah naungan pemerintahan
- d. Nilai norma sebagai norma normatif dari adanya peran yang dijalankan secara langsung oleh organisasi Gerkatina berasal dari landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam organisasi Gerkatina.

B. Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai dasar kepentingan berbagai pihak terkait laporan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut : Pemerintah seharusnya lebih menggiatkan kegiatan pendidikan politik dan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu.

1. Pemerintah membuat jadwal atau agenda secara berkala untuk memberikan pelatihan khusus terhadap penyandang disabilitas khususnya tunarungu.
2. Pemerintah membuka rekrutmen pendamping warga disabilitas secara khusus dengan kuota penerimaan lebih banyak dari periode sebelumnya sehingga dapat memudahkan khususnya penyandang disabilitas pada proses Pemilu.
3. Pemerintah diharapkan membuat forum aspirasi bersama organisasi penyandang disabilitas untuk dapat mengetahui secara detail *problem* atau permasalahan dan kendala yang dirasakan oleh penyandang disabilitas dan menjadi refleksi untuk periode kedepannya jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, dkk. (2019). *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: KPU RI
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman*. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29-41.
- Dedi, A. (2020). *Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 14-28.
- Dio, dkk. (2019). *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru Dan Reformasi*. Padang : UNP Press
- Febriantanto, P. (2019). *Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017*. *Jurnal PolGov*, 1(1), 157-190.
- Fikri, A. M. (2019). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Payakumbuh Tahun 2017*. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 1(1), 44-65.
- Hamid, T. R. (2022). *Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Upaya Penyetaraan Hak Pilih Pada Pemilihan Bupati Di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2022* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Ishak, Joni. (2012). *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. Jakarta : BAPPENAS, KSP, JPODI
- Krishna, A. (2022). *Meningkatkan Partisipasi Politik dalam Dmokrasi: Apa Peran Modal Sosial* . *Studi Politik Komparatif*. 35(4) :437-60
- Lukitoaji, B. D., & Noormiyanto, F. (2020). *Pengaruh Political Internet User Terhadap Partisipasi Politik Disabilitas Rungu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 5(1), 10-18.
- Mais, A., & Yaum, L. A. (2019). *Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember*. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*, 2(2), 78-87.

- Milbrath, L..(1965). *Partisipasi Politik : Bagaimana dan Mengapa Orang Terlibat dalam Politik?*. Chicago : Rand McNally College
- Milbrath, L.& Goel, M.(1977). *Partisipasi Politik : Bagaimana dan Mengapa Orang Terlibat dalam Politik?*. Boston : Rand McNally College University Press America
- Pangestu, A., Agustino, L., & Bintari, A. (2020). *Peran PPUA Disabilitas Dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 (Studi Tentang Pencalonan Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019)*. Jurnal Bawaslu DKI Jakarta, 3, 145-164.
- Parameswara, A. V. (2019). *Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang)*. Skripsi
- Pennock, J. & Chapman, J. (1975). *Partisipasi dalam Politik* . Newyork, Lieber-Atherton
- Pratiwi, R. H., & Susanti, M. H. (2020). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017*. Jurnal. Semarang : Negeri Semarang. 4(2) : 36-40
- Salim &Syahrums. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : Citra Pustaka Media.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2014). *Teori-Teori Psikologi Sosial* . Jakarta : Rajawali Pers. 17 : 215-230
- Scaff, L. (1975). *Dua Konsep Partisipasi Politik, Triwulanan Politik Barat*. 28(3) : 447-462
- Sutopo, H. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya*. Jakarta : PustakaJaya.

LAMPIRAN

Surat Pengantar Penelitian/Wawancara Gambar 1.18



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2596/Un.10.6/K/KM.05.01/11/2022 Semarang, 14 November 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Pengurus Bidang Kepemudaan GERKATIN DPP DKI Jakarta
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Partisipasi Politik Warga Disabilitas (Studi Kasus Komunitas GERKATIN DPP DKI Jakarta) Pada Pemilu 2019".

di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Adinda Widya Rini
NIM : 1906016068
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Jakarta, 6 Juli 2001
CP/e-mail : 085717072414 / adindawid06@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Teguh Wiyono / Rini Purbani
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Ibu Rumah Tangga
Alamat : Citra Indah City, Cluster Bukit Heliconia AG.01 NO.30
Singajaya Jonggol, Kab.Bogor, Jawa Barat

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Kasub.ag Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni



H. Gunawan, S.Ag.M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Kantor Gerkatind DPD DKI Jakarta dan Wawancara bersama Pengurus DPP Gerkatind Bidang Kepemudaan

Gambar 1.19



Wawancara dengan Bapak Fedayen selaku Humas Gerkatind

Gambar 1.20



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : Adinda Widya Rini
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Jakarta, 6 Juli 2001
JENIS KELAMIN : Perempuan
AGAMA : Islam
ALAMAT : Citra Indah Cluster Bukit
Heliconia, AG.01 No.30,
Kab.Bogor, Jawa Barat
EMAIL : adindawid06@gmail.com
NO.HP : 085717072414

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2007-2013 : SDN Tunggilis
2. 2013-2016 : SMPN 1 Cileungsi
3. 2016-2019 : SMAN 1 Cileungsi
4. 2019-Sekarang : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. 2020 : Staff Komisi B Senat Mahasiswa FISIP UIN Walisongo Semarang
2. 2021 : Komisi 1 Senat Mahasiswa FISIP UIN Walisongo Semarang
3. 2022 : Sekretaris UKM Fisip Sport Club UIN Walisongo Semarang
4. 2022 : Wakil Ketua 2 Senat Mahasiswa FISIP UIN Walisongo Semarang

PENGHARGAAN

1. 2020-2022 : Awardee BlueBirdGroup (BBG) Scholarships

